



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 42
TAHUN 2015 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa upaya menjaga keselarasan kodefikasi akun seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, baik dalam rangka penyusunan dokumen anggaran maupun penyajian laporan keuangan, yang disebabkan peralihan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ke Sistem Informasi Daerah (SIMDA) yang memiliki perbedaan pendekatan karakteristik struktur data, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Bagan Akun Standar (Chart Of Account);
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya didukung oleh penggunaan aplikasi sistem, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk-bentuk format terstruktur Bagan Akun Standar (Chart of Account) yang baru yang mengatur kodefikasi akun seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi perlu disusun kembali yang diselaraskan dengan aplikasi sistem yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 tentang Bagan Akun Standar pada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

11. Basis AkruaI adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
16. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, utang dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu.
18. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
19. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
21. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

22. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
23. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
26. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
29. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
30. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara Akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
31. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
32. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
33. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

34. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
35. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pengguna laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan, akuntabel dan auditabel.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan kodifikasi dalam penyusunan dokumen anggaran;
 - b. kebutuhan kodifikasi dalam penatausahaan keuangan, yang dilakukan baik secara manual maupun menggunakan fasilitas teknologi informasi; dan
 - c. kebutuhan kodifikasi dalam penyajian dokumen penyusunan laporan keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan BAS, yang meliputi:
 1. Umum;
 2. BAS dalam Dokumen Anggaran;
 3. BAS dalam Penatausahaan Keuangan; dan
 4. BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penerapan Kode Akun dalam Laporan Keuangan, yang meliputi:
 1. Kode Akun;
 2. Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca;
 3. Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
 4. Kode Akun LO dalam Laporan Operasional.
- c. Kodifikasi BAS;

- d. Pembinaan dan Pengendalian;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB IV PENYUSUNAN BAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BAS disusun dalam bentuk serangkaian kode-kode dalam bentuk susunan angka yang dirangkai secara terstruktur, yang meliputi kode akun (*chart of account*), kelompok, jenis obyek dan rincian obyek untuk mendefinisikan secara sederhana atas seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilaksanakan di setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) level, yang meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Bagian Kedua BAS dalam Dokumen Anggaran

Pasal 5

- (1) Kodifikasi dalam BAS untuk penyusunan dokumen anggaran didasarkan pada kebijakan Akuntansi Basis Kas.

Bagian Ketiga BAS dalam Penatausahaan Keuangan

Pasal 6

- (1) Kodifikasi dalam BAS untuk penatausahaan keuangan merupakan media dalam melakukan identifikasi atas transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang dilakukan di setiap Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat BAS dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Kodifikasi dalam BAS untuk penyajian laporan keuangan menggunakan kode-kode akun dengan berpedoman kepada

BAS yang terinci sampai dengan level 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang disusun untuk memenuhi kebutuhan penyajian laporan keuangan, yang meliputi:

- a. penyajian Laporan Neraca yang memuat akun Neraca;
- b. penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang memuat akun Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan; dan
- c. penyajian LO yang memuat akun Pendapatan-LO dan Beban.

Pasal 8

Penyajian dokumen penganggaran, dokumen penatausahaan, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 memuat kode akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagan Akun Standar (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENERAPAN KODE AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kode Akun

Pasal 9

- (1) Kodifikasi akun untuk penyusunan laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterapkan untuk:
 - b. pengakuan transaksi;
 - c. penilaian transaksi;
 - d. penyajian transaksi;
 - e. pengungkapan transaksi; dan/atau
 - f. kejadian ekonomi.
- (3) Kodifikasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembentuk setiap jenis laporan keuangan setelah melalui tindakan identifikasi, pencatatan dan pengungkapannya berdasarkan SAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi Neraca, laporan realisasi anggaran dan LO yang dilaksanakan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Kodifikasi akun sebagai dasar pembuatan dokumen penganggaran, pembuatan dokumen penatausahaan, dan pembentuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Akun 1 (satu) diberi kode angka 1 (satu) untuk menunjukkan akun Aset;
 - b. Akun 2 (dua) diberi kode angka 2 (dua) untuk menunjukkan akun Kewajiban;
 - c. Akun 3 (tiga) diberi kode angka 3 (tiga) untuk

menunjukkan akun Ekuitas;

- d. Akun 4 (empat) diberi kode angka 4 (empat) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LRA;
- e. Akun 5 (lima) diberi kode angka 5 (lima) untuk menunjukkan akun Belanja;
- f. Akun 6 (enam) diberi kode angka 6 (enam) untuk menunjukkan akun Transfer;
- g. Akun 7 (tujuh) diberi kode angka 7 (tujuh) untuk menunjukkan akun Pembiayaan;
- h. Akun 8 (satu) diberi kode angka 8 (delapan) untuk menunjukkan akun Pendapatan-LO; dan
- i. Akun 9 (sembilan) diberi kode angka 9 (sembilan) untuk menunjukkan akun Beban.

Bagian Kedua

Kode Akun Neraca dalam Laporan Neraca

Pasal 10

- (1) Laporan Neraca disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun Neraca, yang meliputi:
 - a. akun Aset;
 - b. akun Kewajiban; dan
 - c. akun Ekuitas.
- (2) Akun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas seluruh sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (3) Akun Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas Kewajiban/hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

Pasal 11

(1) Kode akun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
1.0.0.00.00	ASET
1.1.0.00.00	ASET LANCAR
1.1.1.00.00	Kas
1.1.2.00.00	Investasi Jangka Pendek
1.1.3.00.00	Piutang Pendapatan
1.1.4.00.00	Piutang Lainnya
1.1.5.00.00	Penyisihan Piutang
1.1.6.00.00	Beban Dibayar Dimuka
1.1.7.00.00	Persediaan
1.1.8.00.00	Aset Untuk Dikonsolidasikan
1.2.0.00.00	INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1.00.00	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.2.00.00	Investasi Jangka Panjang Permanen
1.3.0.00.00	ASET TETAP
1.3.1.00.00	Tanah
1.3.2.00.00	Gedung dan Bangunan
1.3.3.00.00	Peralatan dan Mesin
1.3.4.00.00	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.3.5.00.00	Aset Tetap Lainnya
1.3.6.00.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7.00.00	Akumulasi Penyusutan
1.4.0.00.00	DANA CADANGAN
1.4.1.00.00	Dana Cadangan
1.5.0.00.00	ASET LAINNYA
1.5.1.00.00	Tagihan Jangka Panjang
1.5.2.00.00	Kemitraan Dengan Pihak Ke Tiga
1.5.3.00.00	Aset Tidak Berwujud
1.5.4.00.00	Aset Lain-lain

(2) Kode akun Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
2.0.0.00.00	KEWAJIBAN
2.1.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2.1.2.00.00	Utang Bunga
2.1.3.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.00.00	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.5.00.00	Utang Beban
2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek lainnya
2.2.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
2.2.2.00.00	Utang Jangka Panjang Lainnya

- (3) Kode akun Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
3.0.0.00.00	EKUITAS
3.1.0.00.00	Ekuitas
3.1.1.00.00	Ekuitas
3.1.2.00.00	Ekuitas SAL
3.1.3.00.00	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Bagian Ketiga

Kode Akun LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 12

- (1) Laporan Realisasi Anggaran disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LRA, yang meliputi:
- a. Akun Pendapatan-LRA;
 - b. Akun Belanja;
 - c. Akun Transfer; dan
 - d. Akun Pembiayaan.
- (2) Akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Akun Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Akun Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih, dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah dan bersifat transitoris atau bukan berasal dari bagian dari kewenangan otonomi penuh Pemerintah Daerah dan/atau bersifat pendanaan kegiatan operasional sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya, maupun pendanaan kegiatan sinergitas pembangunan di Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

- (5) Akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Kode akun Pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
4.0.0.00.00	PENDAPATAN-LRA
4.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA
4.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah-LRA
4.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
4.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA
4.2.1.00.00	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN-LRA
4.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA
4.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LRA
4.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA
4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LRA
4.3.2.00.00	Dana Darurat-LRA
4.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LRA

- (2) Kode akun Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
5.0.0.00.00	BELANJA
5.1.0.00.00	BELANJA OPERASI
5.1.1.00.00	Belanja Pegawai
5.1.2.00.00	Belanja Barang dan Jasa
5.1.3.00.00	Belanja Bunga
5.1.4.00.00	Belanja Subsidi
5.1.5.00.00	Belanja Hibah
5.1.6.00.00	Belanja Bantuan Sosial
5.2.0.00.00	BELANJA MODAL
5.2.1.00.00	Belanja Modal Tanah
5.2.2.00.00	Belanja Modal Peralatan Mesin
5.2.3.00.00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4.00.00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.3.00.00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(3) Kode akun Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
6.0.0.00.00	TRANSFER
6.1.0.00.00	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6.1.1.00.00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6.1.2.00.00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2.0.00.00	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya
6.2.2.00.00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3.00.00	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6.2.4.00.00	Transfer Dana Otonomi Khusus

(4) Kode akun Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
7.0.0.00.00	PEMBIAYAAN
7.1.0.00.00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1.00.00	Penggunaan SILPA
7.1.2.00.00	Pencairan Dana Cadangan
7.1.3.00.00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
7.1.4.00.00	Pinjaman Dalam Negeri
7.1.5.00.00	Penerimaan Kembali Piutang
7.1.6.00.00	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen lainnya
7.1.7.00.00	Pinjaman Luar Negeri
7.1.8.00.00	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.0.00.00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1.00.00	Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2.00.00	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah
7.2.3.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.2.4.00.00	Pemberian Pinjaman Daerah
7.2.5.00.00	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.6.00.00	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7.00.00	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Keempat
Kode Akun LO dalam Laporan Operasional
Pasal 14

- (1) Laporan Operasional disusun melalui proses identifikasi, pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam pengelolaan keuangan yang dibentuk dari akun LO, yang meliputi:
 - a. Akun Pendapatan-LO; dan
 - b. Akun Beban.
- (2) Akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan atau kejadian ekonomi atas seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang disajikan serta disandingkan dengan periode sebelumnya.
- (3) Akun Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode-kode akun yang menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.

Pasal 15

- (1) Kode akun Pendapatan-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
8.0.0.00.00	PENDAPATAN-LO
8.1.0.00.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
8.1.1.00.00	Pendapatan Pajak Daerah-LO
8.1.2.00.00	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
8.1.3.00.00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
8.1.4.00.00	Lain-lain PAD Yang Sah-LO
8.2.0.00.00	PENDAPATAN TRANSFER-LO
8.2.1.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8.2.2.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
8.2.3.00.00	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO
8.2.4.00.00	Bantuan Keuangan-LO
8.3.0.00.00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
8.3.1.00.00	Pendapatan Hibah-LO
8.3.2.00.00	Dana Darurat-LO
8.3.3.00.00	Pendapatan Lainnya-LO
8.4.0.00.00	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
8.4.1.00.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
8.4.2.00.00	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8.4.3.00.00	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO
8.5.0.00.00	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO
8.5.1.00.00	Pendapatan Luar Biasa-LO

- (2) Kode-kode akun Beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.0.0.00.00	BEBAN
9.1.0.00.00	BEBAN OPERASI-LO
9.1.1.00.00	Beban Pegawai-LO
9.1.2.00.00	Beban Barang dan Jasa-LO
9.1.3.00.00	Beban Bunga-LO
9.1.4.00.00	Beban Subsidi-LO
9.1.5.00.00	Beban Hibah-LO
9.1.6.00.00	Beban Bantuan Sosial-LO
9.1.7.00.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.8.00.00	Beban Penyisihan Piutang
9.1.9.00.00	Beban Lain-lain

Pasal 16

- (1) Selain akun beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) perlu dilakukan penambahan kode-kode akun beban berupa akun beban lainnya untuk menyatakan transaksi dan/atau kejadian ekonomi atas penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, berupa pengeluaran uang atau Kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode-kode akun Beban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjukan transaksi dan/atau kejadian ekonomi yang akan berakibat pada penurunan Ekuitas dari suatu Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. Akun Beban Lainnya Tranfer-LO;
 - b. Akun Beban Lainnya Non Operasional; dan
 - c. Akun Beban Lainnya Luar Biasa.

Pasal 17

- (1) Kode-kode akun Beban Lainnya Tranfer-LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.2.0.00.00	BEBAN TRANSFER
9.2.1.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9.2.2.00.00	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9.2.3.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9.2.5.00.00	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

- (2) Kode-kode akun Beban Lainnya Non Operasional -LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.3.0.00.00	DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1.00.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar- LO
9.3.2.00.00	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
9.3.3.00.00	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- (3) Kode-kode akun Beban Lainnya Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:

Kode Akun	Nama Akun
9.4.0.00.00	Beban Luar Biasa
9.4.1.00.00	Beban Luar Biasa

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) SKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan BAS kepada SKPD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, supervise, bimbingan teknis dan/atau asistensi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Hal-hal lain berkenaan pengaturan, prosedur penyusunan dan penyelenggaraan BAS selain dilakukan untuk tujuan penyajian dokumen anggaran dan penyajian laporan keuangan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Walikota ini, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap semua akun untuk mewujudkan kesesuaian proses penganggaran, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkenaan dengan adanya perbedaan perlakuan basis Akuntansi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 September 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 288



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KODE REKENING AKRUAL

Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1	ASET		
1 . 1	ASET LANCAR		
1 . 1 . 1	Kas	D	D
1 . 1 . 1 . 01	Kas di Kas Daerah		
1 . 1 . 1 . 01 . 01	Kas di Kas Daerah.....		
1 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 1 . 02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1 . 1 . 1 . 02 . 01	Kas di Bendahara Penerimaan		
1 . 1 . 1 . 03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		
1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai		
1 . 1 . 1 . 04	Kas di BLUD		
1 . 1 . 1 . 04 . 01	Kas di BLUD		
1 . 1 . 1 . 05	Kas Lainnya		
1 . 1 . 1 . 05 . 01	Kas Lainnya		
1 . 1 . 1 . 06	Setara Kas		
1 . 1 . 1 . 06 . 01	Setara Kas		
1 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	D	D
1 . 1 . 2 . 01	Investasi dalam Saham		
1 . 1 . 2 . 01 . 01	Investasi dalam Saham		
1 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 2 . 02	Investasi dalam Deposito		
1 . 1 . 2 . 02 . 01	Deposito Jangka Pendek		
1 . 1 . 2 . 03	Investasi Dalam SUN		
1 . 1 . 2 . 03 . 01	Investasi Dalam SUN		
1 . 1 . 2 . 04	Investasi Dalam SBI		
1 . 1 . 2 . 04 . 01	Investasi Dalam SBI		
1 . 1 . 2 . 05	Investasi Dalam SPN		
1 . 1 . 2 . 05 . 01	Investasi Dalam SPN		
1 . 1 . 2 . 06	Investasi Jangka Pendek BLUD		
1 . 1 . 2 . 06 . 01	Investasi Jangka Pendek BLUD		
1 . 1 . 2 . 07	Investasi Jangka Pendek Lainnya		
1 . 1 . 2 . 07 . 01	Investasi Jangka Pendek Lainnya		
1 . 1 . 3	Piutang Pendapatan	D	D
1 . 1 . 3 . 01	Piutang Pajak Daerah		
1 . 1 . 3 . 01 . 01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		
1 . 1 . 3 . 01 . 02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
1 . 1 . 3 . 01 . 03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
1 . 1 . 3 . 01 . 04	Piutang Pajak Air Permukaan		
1 . 1 . 3 . 01 . 05	Piutang Pajak Rokok		
1 . 1 . 3 . 01 . 06	Piutang Pajak Hotel		
1 . 1 . 3 . 01 . 07	Piutang Pajak Restoran		
1 . 1 . 3 . 01 . 08	Piutang Pajak Hiburan		
1 . 1 . 3 . 01 . 09	Piutang Pajak Reklame		
1 . 1 . 3 . 01 . 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan		
1 . 1 . 3 . 01 . 11	Piutang Pajak Parkir		
1 . 1 . 3 . 01 . 12	Piutang Pajak Air Tanah		
1 . 1 . 3 . 01 . 13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
1 . 1 . 3 . 01 . 14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
1 . 1 . 3 . 01 . 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
1 . 1 . 3 . 01 . 16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
1 . 1 . 3 . 01 . 17	Piutang Pajak Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 1 . 3 . 02	Piutang Retribusi		
1 . 1 . 3 . 02 . 01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		
1 . 1 . 3 . 02 . 02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		
1 . 1 . 3 . 02 . 03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
1 . 1 . 3 . 02 . 04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
1 . 1 . 3 . 02 . 05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
1 . 1 . 3 . 02 . 06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		
1 . 1 . 3 . 02 . 07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
1 . 1 . 3 . 02 . 08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
1 . 1 . 3 . 02 . 09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
1 . 1 . 3 . 02 . 10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
1 . 1 . 3 . 02 . 11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
1 . 1 . 3 . 02 . 12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
1 . 1 . 3 . 02 . 13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan		
1 . 1 . 3 . 02 . 14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
1 . 1 . 3 . 02 . 15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
1 . 1 . 3 . 02 . 16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan		
1 . 1 . 3 . 02 . 17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan		
1 . 1 . 3 . 02 . 18	Piutang Retribusi Terminal		
1 . 1 . 3 . 02 . 19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir		
1 . 1 . 3 . 02 . 20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa		
1 . 1 . 3 . 02 . 21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan		
1 . 1 . 3 . 02 . 22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		
1 . 1 . 3 . 02 . 23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		
1 . 1 . 3 . 02 . 24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air		
1 . 1 . 3 . 02 . 25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
1 . 1 . 3 . 02 . 26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
1 . 1 . 3 . 02 . 27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
1 . 1 . 3 . 02 . 28	Piutang Retribusi Izin Gangguan		
1 . 1 . 3 . 02 . 29	Piutang Retribusi Izin Trayek		
1 . 1 . 3 . 02 . 30	Piutang Retribusi Izin Perikanan		
1 . 1 . 3 . 02 . 31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas		
1 . 1 . 3 . 02 . 32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
1 . 1 . 3 . 02 . 33	Piutang Retribusi Bongkar Muat		
1 . 1 . 3 . 02 . 34	Piutang Retribusi Izin Usaha Angkutan		
1 . 1 . 3 . 02 . 35	Piutang Retribusi Leges		
1 . 1 . 3 . 02 . 36	Piutang Retribusi Izin Usaha Angkutan		
1 . 1 . 3 . 02 . 37	Piutang Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan		
1 . 1 . 3 . 02 . 38	Piutang Retribusi Izin Usaha Perdagangan		
1 . 1 . 3 . 02 . 39	Piutang Retribusi Izin Usaha Industri		
1 . 1 . 3 . 02 . 40	Retribusi Izin Pertambangan Daerah		
1 . 1 . 3 . 02 . 41	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan		
1 . 1 . 3 . 03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1 . 1 . 3 . 03 . 01	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPRS Al-Madina		
1 . 1 . 3 . 03 . 02	Piutang Bagian Laba atas BUMD Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya		
1 . 1 . 3 . 03 . 03	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN		
1 . 1 . 3 . 03 . 04	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		
1 . 1 . 3 . 04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1 . 1 . 3 . 04 . 01	Piutang Jasa Giro		
1 . 1 . 3 . 04 . 02	Piutang Bunga deposito		
1 . 1 . 3 . 04 . 03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1 . 1 . 3 . 04 . 04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
1 . 1 . 3 . 04 . 05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1 . 1 . 3 . 04 . 06	Piutang Denda Pajak		
1 . 1 . 3 . 04 . 07	Piutang Denda Retribusi		
1 . 1 . 3 . 04 . 08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan		
1 . 1 . 3 . 04 . 09	Piutang dari Pengembalian		
1 . 1 . 3 . 04 . 10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
1 . 1 . 3 . 04 . 11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1 . 1 . 3 . 04 . 12	Piutang Zakat		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 1 . 3 . 04 . 13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
1 . 1 . 3 . 04 . 14	Piutang BLUD		
1 . 1 . 3 . 04 . 15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
1 . 1 . 3 . 04 . 16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir		
1 . 1 . 3 . 04 . 17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya		
1 . 1 . 3 . 04 . 18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda		
1 . 1 . 3 . 04 . 19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1 . 1 . 3 . 04 . 20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
1 . 1 . 3 . 04 . 21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN		
1 . 1 . 3 . 04 . 22	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKTP		
1 . 1 . 3 . 05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1 . 1 . 3 . 05 . 01	Piutang Bagi Hasil Pajak		
1 . 1 . 3 . 05 . 02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		
1 . 1 . 3 . 05 . 03	Piutang Dana Alokasi Umum		
1 . 1 . 3 . 05 . 04	Piutang Dana Alokasi Khusus		
1 . 1 . 3 . 06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1 . 1 . 3 . 06 . 01	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur		
1 . 1 . 3 . 06 . 02	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus		
1 . 1 . 3 . 06 . 03	Piutang Transfer Dana Keistimewaan		
1 . 1 . 3 . 06 . 04	Piutang Transfer Dana Penyesuaian		
1 . 1 . 3 . 07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1 . 1 . 3 . 07 . 01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		
1 . 1 . 3 . 07 . 02	Piutang Transfer Lainnya...		
1 . 1 . 3 . 07 . 03	Piutang Bantuan Keuangan....		
1 . 1 . 3 . 08	Piutang Pendapatan Lainnya		
1 . 1 . 3 . 08 . 01	Piutang Pendapatan Lainnya....		
1 . 1 . 3 . 08 . 02	Piutang Pendapatan Hibah...		
1 . 1 . 4	Piutang Lainnya	D	D
1 . 1 . 4 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
1 . 1 . 4 . 01 . 01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
1 . 1 . 4 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1 . 1 . 4 . 02 . 01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara		
1 . 1 . 4 . 02 . 02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah		
1 . 1 . 4 . 02 . 03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah		
1 . 1 . 4 . 02 . 04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
1 . 1 . 4 . 03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1 . 1 . 4 . 03 . 01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III		
1 . 1 . 4 . 03 . 02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas		
1 . 1 . 4 . 03 . 03	Dst.....		
1 . 1 . 4 . 04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1 . 1 . 4 . 04 . 01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		
1 . 1 . 4 . 04 . 02	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		
1 . 1 . 4 . 05	Uang Muka		
1 . 1 . 4 . 05 . 01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		
1 . 1 . 4 . 05 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 4 . 06	Panjar Kegiatan		
1 . 1 . 4 . 06 . 01	Panjar Kegiatan		
1 . 1 . 4 . 06 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 5	Penyisihan Piutang	D	D
1 . 1 . 5 . 01	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1 . 1 . 5 . 01 . 01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1 . 1 . 5 . 01 . 02	Penyisihan Piutang Retribusi		
1 . 1 . 5 . 01 . 03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1 . 1 . 5 . 01 . 04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 1 . 5 . 01 . 05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana		
	Perimbangan		
1 . 1 . 5 . 01 . 06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1 . 1 . 5 . 01 . 07	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
1 . 1 . 5 . 01 . 08	Dst.....		
. 1 . 5 . 02	Penyisihan Piutang Lainnya		
1 . 1 . 5 . 02 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
1 . 1 . 5 . 02 . 02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		
	kepada Entitas Lainnya		
1 . 1 . 5 . 02 . 03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1 . 1 . 5 . 02 . 04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian		
1 . 1 . 5 . 02 . 05	Penyisihan Uang Muka		
1 . 1 . 5 . 02 . 06	Dst.....		
1 . 1 . 6	Beban Dibayar Dimuka	D	
1 . 1 . 6 . 01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 01 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 01 . 03	Dst.....		
1 . 1 . 6 . 02	Beban Barang Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Barang Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 6 . 03	Beban Jasa Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 03 . 01	Beban Jasa Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 03 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 6 . 04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 04 . 01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 6 . 05	Beban Lainnya Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 05 . 01	Beban Lainnya Dibayar Dimuka		
1 . 1 . 6 . 05 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 7	Persediaan	D	
1 . 1 . 7 . 01	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor		
1 . 1 . 7 . 01 . 02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
1 . 1 . 7 . 01 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery		
	kering)		
1 . 1 . 7 . 01 . 04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya		
1 . 1 . 7 . 01 . 05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
1 . 1 . 7 . 01 . 06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas		
1 . 1 . 7 . 01 . 07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran		
1 . 1 . 7 . 01 . 08	Persediaan Isi tabung gas		
1 . 1 . 7 . 01 . 09	Dst.....		
1 . 1 . 7 . 02	Persediaan Bahan/Material		
1 . 1 . 7 . 02 . 01	Persediaan Bahan baku bangunan		
1 . 1 . 7 . 02 . 02	Persediaan Bahan/bibit tanaman		
1 . 1 . 7 . 02 . 03	Persediaan Bibit ternak		
1 . 1 . 7 . 02 . 04	Persediaan Bahan obat-obatan		
1 . 1 . 7 . 02 . 05	Persediaan Bahan kimia		
1 . 1 . 7 . 02 . 06	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
1 . 1 . 7 . 02 . 07	Dst.....		
1 . 1 . 7 . 03	Persediaan Barang Lainnya		
1 . 1 . 7 . 03 . 01	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga		
1 . 1 . 7 . 03 . 02	Dst.....		
1 . 1 . 8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	D	
1 . 1 . 8 . 01	R/K SKPD		
1 . 1 . 8 . 01 . 01	R/K SKPD		
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1 . 2 . 1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D	
1 . 2 . 1 . 01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1 . 2 . 1 . 01 . 01	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 2 . 1 . 01 . 02	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	D	
1 . 2 . 1 . 01 . 03	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta		
1 . 2 . 1 . 01 . 04	Investasi kepada Pemerintah Pusat		
1 . 2 . 1 . 01 . 05	Investasi kepada Pemerintah Daerah		
1 . 2 . 1 . 01 . 06	Dst.....		
1 . 2 . 1 . 02	Investasi dalam Obligasi		
1 . 2 . 1 . 02 . 01	Investasi dalam Obligasi.....		
1 . 2 . 1 . 02 . 02	Dst.....		
1 . 2 . 1 . 03	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
1 . 2 . 1 . 03 . 01	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
1 . 2 . 1 . 03 . 02	Dst.....		
1 . 2 . 1 . 04	Dana Bergulir		
1 . 2 . 1 . 04 . 01	Dana Bergulir		
1 . 2 . 1 . 04 . 02	Dst.....		
1 . 2 . 1 . 05	Deposito Jangka Panjang		
1 . 2 . 1 . 05 . 01	Deposito Jangka Panjang		
1 . 2 . 1 . 05 . 02	Dst.....		
1 . 2 . 1 . 06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1 . 2 . 1 . 06 . 01	Investasi Non Permanen Lainnya		
1 . 2 . 1 . 06 . 02	Dst.....		
1 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
1 . 2 . 2 . 01 . 01	Penyertaan Modal Kepada BUMN		
1 . 2 . 2 . 01 . 02	Penyertaan Modal Kepada BUMD		
1 . 2 . 2 . 01 . 03	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta		
1 . 2 . 2 . 01 . 04	Dst.....		
1 . 2 . 2 . 02	Investasi Permanen Lainnya		
1 . 2 . 2 . 02 . 01	Investasi Permanen Lainnya		
1 . 2 . 2 . 02 . 02	Dst.....		
1 . 3	ASET TETAP	D	
1 . 3 . 1	Tanah		
1 . 3 . 1 . 01	Tanah Perkampungan		
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Kampung		
1 . 3 . 1 . 01 . 02	Tanah Emplasmen		
1 . 3 . 1 . 01 . 03	Tanah Kuburan		
1 . 3 . 1 . 02	Tanah Pertanian		
1 . 3 . 1 . 02 . 01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami		
1 . 3 . 1 . 02 . 02	Tanah Tegalan		
1 . 3 . 1 . 02 . 03	Tanah Ladang		
1 . 3 . 1 . 03	Tanah Perkebunan		
1 . 3 . 1 . 03 . 01	Tanah Perkebunan		
1 . 3 . 1 . 04	Kebun Campuran		
1 . 3 . 1 . 04 . 01	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan		
1 . 3 . 1 . 04 . 02	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain		
1 . 3 . 1 . 05	Hutan		
1 . 3 . 1 . 05 . 01	Hutan Lebat		
1 . 3 . 1 . 05 . 02	Hutan Belukar		
1 . 3 . 1 . 05 . 03	Hutan Tanaman Jenis		
1 . 3 . 1 . 05 . 04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa		
1 . 3 . 1 . 05 . 05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus		
1 . 3 . 1 . 06	Kolam Ikan		
1 . 3 . 1 . 06 . 01	Kolam Ikan Tambak		
1 . 3 . 1 . 06 . 02	Kolam Ikan Air Tawar		
1 . 3 . 1 . 07	Danau/Rawa		
1 . 3 . 1 . 07 . 01	Tanah Rawa		
1 . 3 . 1 . 07 . 02	Tanah Danau		
1 . 3 . 1 . 08	Tanah Tandus/Rusak		
1 . 3 . 1 . 08 . 01	Tanah Tandus		
1 . 3 . 1 . 08 . 02	Tanah Rusak		
1 . 3 . 1 . 09	Alang-alang dan Padang Rumput		
1 . 3 . 1 . 09 . 01	Tanah Alang-alang		
1 . 3 . 1 . 09 . 02	Tanah Padang Rumput		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 1 . 10	Tanah Pengguna Lain	D	
1 . 3 . 1 . 10 . 01	Tanah Penggalian		
1 . 3 . 1 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung		
1 . 3 . 1 . 11 . 01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
1 . 3 . 1 . 11 . 02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
1 . 3 . 1 . 11 . 03	Tanah Untuk Bangunan Industri		
1 . 3 . 1 . 11 . 04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		
1 . 3 . 1 . 11 . 05	Tanah Kosong		
1 . 3 . 1 . 11 . 06	Tanah Peternakan		
1 . 3 . 1 . 11 . 07	Tanah Bangunan Pengairan		
1 . 3 . 1 . 11 . 08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan		
1 . 3 . 1 . 11 . 09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst		
1 . 3 . 1 . 12	Tanah Pertambangan		
1 . 3 . 1 . 12 . 01	Tanah Pertambangan		
1 . 3 . 1 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
1 . 3 . 1 . 13 . 01	Tanah Lapangan Olah Raga		
1 . 3 . 1 . 13 . 02	Tanah Lapangan Parkir		
1 . 3 . 1 . 13 . 03	Tanah Lapangan Penimbun Barang		
1 . 3 . 1 . 13 . 04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
1 . 3 . 1 . 13 . 05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
1 . 3 . 1 . 13 . 06	Tanah Lapangan Terbang		
1 . 3 . 1 . 13 . 07	Tanah Untuk Bangunan Jalan		
1 . 3 . 1 . 13 . 08	Tanah Untuk Bangunan Air		
1 . 3 . 1 . 13 . 09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi		
1 . 3 . 1 . 13 . 10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan		
1 . 3 . 1 . 13 . 11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 1 . 13 . 12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga		
1 . 3 . 1 . 13 . 13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah		
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin		
1 . 3 . 2 . 01	Alat-Alat Besar Darat		
1 . 3 . 2 . 01 . 01	Alat-Alat Besar Darat Tractor		
1 . 3 . 2 . 01 . 02	Alat-Alat Besar Darat Grader		
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Alat-Alat Besar Darat Excavator		
1 . 3 . 2 . 01 . 04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver		
1 . 3 . 2 . 01 . 05	Alat-Alat Besar Darat Hauler		
1 . 3 . 2 . 01 . 06	Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment		
1 . 3 . 2 . 01 . 07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment		
1 . 3 . 2 . 01 . 08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment		
1 . 3 . 2 . 01 . 09	Alat-Alat Besar Darat Loader		
1 . 3 . 2 . 01 . 10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat		
1 . 3 . 2 . 01 . 11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses		
1 . 3 . 2 . 02	Alat-Alat Besar Apung		
1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat-Alat Besar Apung Dredger		
1 . 3 . 2 . 02 . 02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator		
1 . 3 . 2 . 02 . 03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger		
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik		
1 . 3 . 2 . 02 . 05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung		
1 . 3 . 2 . 03	Alat-alat Bantu		
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat-alat Bantu Alat Penarik		
1 . 3 . 2 . 03 . 02	Alat-alat Bantu Feeder		
1 . 3 . 2 . 03 . 03	Alat-alat Bantu Compressor		
1 . 3 . 2 . 03 . 04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set		
1 . 3 . 2 . 03 . 05	Alat-alat Bantu Pompa		
1 . 3 . 2 . 03 . 06	Alat-alat Bantu Mesin Bor		
1 . 3 . 2 . 03 . 07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan		
1 . 3 . 2 . 03 . 08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor		
1 . 3 . 2 . 03 . 09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
1 . 3 . 2 . 04	Alat Angkutan Darat Bermotor		
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
1 . 3 . 2 . 04 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 2 . 04 . 03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1 . 3 . 2 . 04 . 04	Kendaraan Bermotor Khusus		
1 . 3 . 2 . 04 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
1 . 3 . 2 . 04 . 06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
1 . 3 . 2 . 05 . 01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1 . 3 . 2 . 05 . 02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang		
1 . 3 . 2 . 06	Alat Angkut Apung Bermotor		
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang		
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 2 . 06 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
1 . 3 . 2 . 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1 . 3 . 2 . 07 . 01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang		
1 . 3 . 2 . 07 . 02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 2 . 07 . 03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus		
1 . 3 . 2 . 08	Alat Angkut Bermotor Udara		
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Kapal Terbang		
1 . 3 . 2 . 09	Alat Bengkel Bermesin		
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi		
1 . 3 . 2 . 09 . 02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah		
1 . 3 . 2 . 09 . 03	Perkakas Bengkel Listrik		
1 . 3 . 2 . 09 . 04	Perkakas Bengkel Service		
1 . 3 . 2 . 09 . 05	Perkakas Pengangkat Bermesin		
1 . 3 . 2 . 09 . 06	Perkakas Bengkel Kayu		
1 . 3 . 2 . 09 . 07	Perkakas Bengkel Khusus		
1 . 3 . 2 . 09 . 08	Peralatan Las		
1 . 3 . 2 . 09 . 09	Perkakas Pabrik Es		
1 . 3 . 2 . 10	Alat Bengkel Tak Bermesin		
1 . 3 . 2 . 10 . 01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
1 . 3 . 2 . 10 . 02	Perkakas Bengkel Listrik		
1 . 3 . 2 . 10 . 03	Perkakas Bengkel Service		
1 . 3 . 2 . 10 . 04	Perkakas Pengangkat		
1 . 3 . 2 . 10 . 05	Perkakas Standar (Standart Tool)		
1 . 3 . 2 . 10 . 06	Perkakas Khusus (Special Tool)		
1 . 3 . 2 . 10 . 07	Perkakas Bengkel Kerja		
1 . 3 . 2 . 10 . 08	Peralatan Tukang-tukang Besi		
1 . 3 . 2 . 10 . 09	Peralatan Tukang Kayu		
1 . 3 . 2 . 10 . 10	Peralatan Tukang Kulit		
1 . 3 . 2 . 10 . 11	Peralatan Ukur, Gip & Feting		
1 . 3 . 2 . 11	Alat Ukur		
1 . 3 . 2 . 11 . 01	Alat Ukur universal		
1 . 3 . 2 . 11 . 02	Alat Ukur/Test Intelegensia		
1 . 3 . 2 . 11 . 03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
1 . 3 . 2 . 11 . 04	Alat Ukur /Test Klinis Lain		
1 . 3 . 2 . 11 . 05	Alat Calibrasi		
1 . 3 . 2 . 11 . 06	Alat Ukur Oscilloscope		
1 . 3 . 2 . 11 . 07	Alat Ukur Universal Tester		
1 . 3 . 2 . 11 . 08	Alat Ukur/Pembanding		
1 . 3 . 2 . 11 . 09	Alat Ukur Lainnya		
1 . 3 . 2 . 11 . 10	Alat Timbangan/Blora		
1 . 3 . 2 . 11 . 11	Anak Timbangan/Biasa		
1 . 3 . 2 . 11 . 12	Takaran Kering		
1 . 3 . 2 . 11 . 13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL		
1 . 3 . 2 . 11 . 14	Takaran Latex/Getah Susu		
1 . 3 . 2 . 11 . 15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas		
1 . 3 . 2 . 12	Alat Pengolahan		
1 . 3 . 2 . 12 . 01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
1 . 3 . 2 . 12 . 02	Alat Panen/Pengolahan		
1 . 3 . 2 . 12 . 03	Alat-Alat Peternakan		
1 . 3 . 2 . 12 . 04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian		
1 . 3 . 2 . 12 . 05	Alat Laboratorium Pertanian		
1 . 3 . 2 . 12 . 06	Alat Prosesing		
1 . 3 . 2 . 12 . 07	Alat Pasca Panen		
1 . 3 . 2 . 12 . 08	Alat Produksi Perikanan		
1 . 3 . 2 . 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1 . 3 . 2 . 13 . 01	Alat Pemeliharaan Tanaman		
1 . 3 . 2 . 13 . 02	Alat Panen		
1 . 3 . 2 . 13 . 03	Alat Penyimpanan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 13 . 04	Alat Laboratorium		
1 . 3 . 2 . 13 . 05	Alat Penangkap Ikan		
1 . 3 . 2 . 14	Alat Kantor		
1 . 3 . 2 . 14 . 01	Mesin Tik		
1 . 3 . 2 . 14 . 02	Mesin Hitung/Jumlah		
1 . 3 . 2 . 14 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)		
1 . 3 . 2 . 14 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
1 . 3 . 2 . 14 . 05	Alat Kantor Lainnya		
1 . 3 . 2 . 15	Alat Rumah Tangga		
1 . 3 . 2 . 15 . 01	Meubelair		
1 . 3 . 2 . 15 . 02	Alat Pengukur Waktu		
1 . 3 . 2 . 15 . 03	Alat Pembersih		
1 . 3 . 2 . 15 . 04	Alat Pendingin		
1 . 3 . 2 . 15 . 05	Alat Dapur		
1 . 3 . 2 . 15 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
1 . 3 . 2 . 15 . 07	Alat Pemadam Kebakaran		
1 . 3 . 2 . 16	Komputer		
1 . 3 . 2 . 16 . 01	Komputer Unit/Jaringan		
1 . 3 . 2 . 16 . 02	Personal Komputer		
1 . 3 . 2 . 16 . 03	Peralatan Komputer Mainframe		
1 . 3 . 2 . 16 . 04	Peralatan Mini Komputer		
1 . 3 . 2 . 16 . 05	Peralatan Personal Komputer		
1 . 3 . 2 . 16 . 06	Peralatan Jaringan		
1 . 3 . 2 . 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 01	Meja Kerja Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 02	Meja Rapat Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 03	Kursi Kerja Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 04	Kursi Rapat Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
1 . 3 . 2 . 17 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat		
1 . 3 . 2 . 18	Alat Studio		
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Peralatan Studio Visual		
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Peralatan Studio Video dan Film		
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Peralatan Studio Video dan Film A		
1 . 3 . 2 . 18 . 04	Peralatan Cetak		
1 . 3 . 2 . 18 . 05	Peralatan Computing		
1 . 3 . 2 . 18 . 06	Peralatan Pemetaan Ukur		
1 . 3 . 2 . 19	Alat Komunikasi		
1 . 3 . 2 . 19 . 01	Alat Komunikasi Telephone		
1 . 3 . 2 . 19 . 02	Alat Komunikasi Radio SSB		
1 . 3 . 2 . 19 . 03	Alat Komunikasi Radio HF/FM		
1 . 3 . 2 . 19 . 04	Alat Komunikasi Radio VHF		
1 . 3 . 2 . 19 . 05	Alat Komunikasi Radio UHF		
1 . 3 . 2 . 19 . 06	Alat Komunikasi Sosial		
1 . 3 . 2 . 19 . 07	Alat-alat Sandi		
1 . 3 . 2 . 20	Peralatan Pemancar		
1 . 3 . 2 . 20 . 01	Peralatan Pemancar MF/MW		
1 . 3 . 2 . 20 . 02	Peralatan Pemancar HF/SW		
1 . 3 . 2 . 20 . 03	Peralatan Pemancar VHF/FM		
1 . 3 . 2 . 20 . 04	Peralatan Pemancar UHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 05	Peralatan Pemancar SHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 06	Peralatan Antena MF/MW		
1 . 3 . 2 . 20 . 07	Peralatan Antena HF/SW		
1 . 3 . 2 . 20 . 08	Peralatan Antena VHF/FM		
1 . 3 . 2 . 20 . 09	Peralatan Antena UHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 10	Peralatan Antena SHF/Parabola		
1 . 3 . 2 . 20 . 11	Peralatan Translator VHF/VHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 12	Peralatan Translator UHF/UHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 13	Peralatan Translator VHF/UHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 14	Peralatan Translator UHF/VHF		
1 . 3 . 2 . 20 . 15	Peralatan Microvawe FPU		
1 . 3 . 2 . 20 . 16	Peralatan Microvawe Terestrial		
1 . 3 . 2 . 20 . 17	Peralatan Microvawe TVRO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 20 . 18	Peralatan Dummy Load		
1 . 3 . 2 . 20 . 19	Switcher Antena		
1 . 3 . 2 . 20 . 20	Switcher/Menara Antena		
1 . 3 . 2 . 20 . 21	Feeder		
1 . 3 . 2 . 20 . 22	Humidity Control		
1 . 3 . 2 . 20 . 23	Program Input Equipment		
1 . 3 . 2 . 20 . 24	Peralatan Antena Penerima VHF		
1 . 3 . 2 . 21	Alat Kedokteran		
1 . 3 . 2 . 21 . 01	Alat Kedokteran Umum		
1 . 3 . 2 . 21 . 02	Alat Kedokteran Gigi		
1 . 3 . 2 . 21 . 03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
1 . 3 . 2 . 21 . 04	Alat Kedokteran Mata		
1 . 3 . 2 . 21 . 05	Alat Kedokteran T.H.T		
1 . 3 . 2 . 21 . 06	Alat Rotgen		
1 . 3 . 2 . 21 . 07	Alat Farmasi		
1 . 3 . 2 . 21 . 08	Alat Kedokteran Bedah		
1 . 3 . 2 . 21 . 09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
1 . 3 . 2 . 21 . 10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam		
1 . 3 . 2 . 21 . 11	Alat Kedokteran Mortuary		
1 . 3 . 2 . 21 . 12	Alat Kesehatan Anak		
1 . 3 . 2 . 21 . 13	Alat Kedokteran Poliklinik Set		
1 . 3 . 2 . 21 . 14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh		
1 . 3 . 2 . 21 . 15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)		
1 . 3 . 2 . 21 . 16	Alat Kedokteran Jantung		
1 . 3 . 2 . 21 . 17	Alat Kedokteran Nuklir		
1 . 3 . 2 . 21 . 18	Alat Kedokteran Radiologi		
1 . 3 . 2 . 21 . 19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
1 . 3 . 2 . 21 . 20	Alat Kedokteran Gawat Darurat		
1 . 3 . 2 . 21 . 21	Alat Kedokteran Jiwa		
1 . 3 . 2 . 21 . 22	Alat Kedokteran Hewan		
1 . 3 . 2 . 22	Alat Kesehatan		
1 . 3 . 2 . 22 . 01	Alat Kesehatan Perawatan		
1 . 3 . 2 . 22 . 02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
1 . 3 . 2 . 22 . 03	Alat Kesehatan Matra Laut		
1 . 3 . 2 . 22 . 04	Alat Kesehatan Matra Udara		
1 . 3 . 2 . 22 . 05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian		
1 . 3 . 2 . 22 . 06	Alat Kesehatan Olahraga		
1 . 3 . 2 . 23	Unit-Unit Laboratorium		
1 . 3 . 2 . 23 . 01	Alat Laboratorium Kimia Air		
1 . 3 . 2 . 23 . 02	Alat Laboratorium Microbiologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 03	Alat Laboratorium Hidro Kimia		
1 . 3 . 2 . 23 . 04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika		
1 . 3 . 2 . 23 . 05	Alat laboratorium Buatan/Geologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
1 . 3 . 2 . 23 . 07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia		
1 . 3 . 2 . 23 . 08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan		
1 . 3 . 2 . 23 . 09	Alat Laboratorium Cocom Tanam		
1 . 3 . 2 . 23 . 10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik		
1 . 3 . 2 . 23 . 11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A		
1 . 3 . 2 . 23 . 12	Alat Laboratorium Umum		
1 . 3 . 2 . 23 . 13	Alat Laboratorium Umum A		
1 . 3 . 2 . 23 . 14	Alat Laboratorium Kedokteran		
1 . 3 . 2 . 23 . 15	Alat Laboratorium Microbiologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 16	Alat Laboratorium Kimia		
1 . 3 . 2 . 23 . 17	Alat Laboratorium Microbiologi A		
1 . 3 . 2 . 23 . 18	Alat Laboratorium Patologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 19	Alat Laboratorium Immunologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 20	Alat Laboratorium Hematologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 21	Alat Laboratorium Film		
1 . 3 . 2 . 23 . 22	Alat Laboratorium Makanan		
1 . 3 . 2 . 23 . 23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi		
1 . 3 . 2 . 23 . 24	Alat Laboratorium Farmasi		
1 . 3 . 2 . 23 . 25	Alat Laboratorium Fisika		
1 . 3 . 2 . 23 . 26	Alat Laboratorium Hidrodinamika		
1 . 3 . 2 . 23 . 27	Alat Laboratorium Klimatologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 28	Alat Laboratorium Proses Peleburan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 23 . 29	Alat Laboratorium Pasir		
1 . 3 . 2 . 23 . 30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan		
1 . 3 . 2 . 23 . 31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola		
1 . 3 . 2 . 23 . 32	Alat Laboratorium Metalography		
1 . 3 . 2 . 23 . 33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
1 . 3 . 2 . 23 . 34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
1 . 3 . 2 . 23 . 35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam		
1 . 3 . 2 . 23 . 36	Alat Laboratorium Matrologie		
1 . 3 . 2 . 23 . 37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam		
1 . 3 . 2 . 23 . 38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas		
1 . 3 . 2 . 23 . 39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil		
1 . 3 . 2 . 23 . 40	Alat Laboratorium Uji Tekstel		
1 . 3 . 2 . 23 . 41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik		
1 . 3 . 2 . 23 . 42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet		
1 . 3 . 2 . 23 . 43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik		
1 . 3 . 2 . 23 . 44	Alat Laboratorium Uji Keramik		
1 . 3 . 2 . 23 . 45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa		
1 . 3 . 2 . 23 . 46	Alat Laboratorium Pertanian		
1 . 3 . 2 . 23 . 47	Alat Laboratorium Pertanian A		
1 . 3 . 2 . 23 . 48	Alat Laboratorium Pertanian B		
1 . 3 . 2 . 23 . 49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya		
1 . 3 . 2 . 23 . 50	Alat Laboratorium Energi Surya		
1 . 3 . 2 . 23 . 51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas		
1 . 3 . 2 . 23 . 52	Alat Laboratorium Oceanografi		
1 . 3 . 2 . 23 . 53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan		
1 . 3 . 2 . 23 . 54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan		
1 . 3 . 2 . 23 . 55	Alat Laboratorium Biologi		
1 . 3 . 2 . 23 . 56	Alat Laboratorium Geofisika		
1 . 3 . 2 . 23 . 57	Alat Laboratorium Tambang		
1 . 3 . 2 . 23 . 58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		
1 . 3 . 2 . 23 . 59	Alat Laboratorium Proses Industri		
1 . 3 . 2 . 23 . 60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		
1 . 3 . 2 . 23 . 61	Laboratorium Kearsipan		
1 . 3 . 2 . 23 . 62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis		
1 . 3 . 2 . 23 . 63	Alat Laboratorium Lainnya		
1 . 3 . 2 . 23 . 64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A		
1 . 3 . 2 . 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1 . 3 . 2 . 24 . 01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia		
1 . 3 . 2 . 24 . 02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika		
1 . 3 . 2 . 24 . 03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar		
1 . 3 . 2 . 24 . 04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan		
1 . 3 . 2 . 24 . 05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah		
1 . 3 . 2 . 24 . 06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas		
1 . 3 . 2 . 24 . 07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS		
1 . 3 . 2 . 24 . 08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam		
1 . 3 . 2 . 24 . 09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan		
1 . 3 . 2 . 24 . 10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian		
1 . 3 . 2 . 24 . 11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga		
1 . 3 . 2 . 24 . 12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP		
1 . 3 . 2 . 24 . 13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		
1 . 3 . 2 . 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1 . 3 . 2 . 25 . 01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument		
1 . 3 . 2 . 25 . 02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor		
1 . 3 . 2 . 25 . 03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool		
1 . 3 . 2 . 25 . 04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A		
1 . 3 . 2 . 25 . 05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils		
1 . 3 . 2 . 25 . 06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment		
1 . 3 . 2 . 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1 . 3 . 2 . 26 . 01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector		
1 . 3 . 2 . 26 . 02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scentific		
1 . 3 . 2 . 26 . 03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System		
1 . 3 . 2 . 26 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 26 . 05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply		
1 . 3 . 2 . 26 . 06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device		
1 . 3 . 2 . 26 . 07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics		
1 . 3 . 2 . 26 . 08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator		
1 . 3 . 2 . 26 . 09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System		
1 . 3 . 2 . 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1 . 3 . 2 . 27 . 01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan		
1 . 3 . 2 . 27 . 02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja		
1 . 3 . 2 . 27 . 03	Proteksi Lingkungan		
1 . 3 . 2 . 27 . 04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment		
1 . 3 . 2 . 27 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi		
1 . 3 . 2 . 28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1 . 3 . 2 . 28 . 01	Radiation Application Equipment		
1 . 3 . 2 . 28 . 02	Non Destructive Test (NDT) Device		
1 . 3 . 2 . 28 . 03	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir		
1 . 3 . 2 . 28 . 04	Peralatan Hidrologi		
1 . 3 . 2 . 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1 . 3 . 2 . 29 . 01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah		
1 . 3 . 2 . 29 . 02	Alat Laboratorium Kualitas Udara		
1 . 3 . 2 . 29 . 03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran		
1 . 3 . 2 . 29 . 04	Laboratorium Lingkungan		
1 . 3 . 2 . 29 . 05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang		
1 . 3 . 2 . 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1 . 3 . 2 . 30 . 01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage		
1 . 3 . 2 . 30 . 02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber		
1 . 3 . 2 . 30 . 03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquistion and Analyzing System		
1 . 3 . 2 . 30 . 04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel		
1 . 3 . 2 . 30 . 05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes		
1 . 3 . 2 . 30 . 06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum		
1 . 3 . 2 . 30 . 07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop		
1 . 3 . 2 . 30 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop		
1 . 3 . 2 . 30 . 09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop		
1 . 3 . 2 . 30 . 10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop		
1 . 3 . 2 . 30 . 11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop		
1 . 3 . 2 . 30 . 12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop		
1 . 3 . 2 . 30 . 13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop		
1 . 3 . 2 . 30 . 14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB		
1 . 3 . 2 . 30 . 15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment		
1 . 3 . 2 . 31	Senjata Api		
1 . 3 . 2 . 31 . 01	Senjata Genggam		
1 . 3 . 2 . 31 . 02	Senjata Pinggang		
1 . 3 . 2 . 31 . 03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang		
1 . 3 . 2 . 31 . 04	Senapan Mesin		
1 . 3 . 2 . 31 . 05	Senjata Api Mortir		
1 . 3 . 2 . 31 . 06	Senjata Api Anti Lapis Baja		
1 . 3 . 2 . 31 . 07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)		
1 . 3 . 2 . 31 . 08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)		
1 . 3 . 2 . 31 . 09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal		
1 . 3 . 2 . 31 . 10	Senjata Api Kavaleri		
1 . 3 . 2 . 31 . 11	Senjata Lain-lain		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 2 . 32	Persenjataan Non Senjata Api	D	
1 . 3 . 2 . 32 . 01	Alat Keamanan		
1 . 3 . 2 . 32 . 02	Non Senjata Api		
1 . 3 . 2 . 33	Amunisi		
1 . 3 . 2 . 33 . 01	Amunisi Umum		
1 . 3 . 2 . 33 . 02	Amunisi Darat		
1 . 3 . 2 . 34	Senjata Sinar		
1 . 3 . 2 . 34 . 01	Senjata Sinar Laser		
1 . 3 . 2 . 35	Alat Keamanan dan Perlindungan		
1 . 3 . 2 . 35 . 01	Alat Bantu Kemanan		
1 . 3 . 2 . 35 . 02	Alat Perlindungan		
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan		
1 . 3 . 3 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor		
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gudang		
1 . 3 . 3 . 01 . 03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel		
1 . 3 . 3 . 01 . 04	Bangunan Gedung Instalasi		
1 . 3 . 3 . 01 . 05	Bangunan Gedung Laboratorium		
1 . 3 . 3 . 01 . 06	Bangunan Kesehatan		
1 . 3 . 3 . 01 . 07	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium		
1 . 3 . 3 . 01 . 08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
1 . 3 . 3 . 01 . 09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1 . 3 . 3 . 01 . 10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
1 . 3 . 3 . 01 . 11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
1 . 3 . 3 . 01 . 12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		
1 . 3 . 3 . 01 . 13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga		
1 . 3 . 3 . 01 . 14	Bangunan Gedung Garasi/Pool		
1 . 3 . 3 . 01 . 15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan		
1 . 3 . 3 . 01 . 16	Bangunan Gedung Pabrik		
1 . 3 . 3 . 01 . 17	Bangunan Stasiun Bus		
1 . 3 . 3 . 01 . 18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak		
1 . 3 . 3 . 01 . 19	Bangunan Gedung Perpustakaan		
1 . 3 . 3 . 01 . 20	Bangunan Gedung Museum		
1 . 3 . 3 . 01 . 21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		
1 . 3 . 3 . 01 . 22	Bangunan Pengujian Kelaikan		
1 . 3 . 3 . 01 . 23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan		
1 . 3 . 3 . 01 . 24	Bangunan Rumah Tahanan		
1 . 3 . 3 . 01 . 25	Bangunan Gedung Kramatorium		
1 . 3 . 3 . 01 . 26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan		
1 . 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
1 . 3 . 3 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Rumah Negara Golongan I		
1 . 3 . 3 . 02 . 02	Rumah Negara Golongan II		
1 . 3 . 3 . 02 . 03	Rumah Negara Golongan III		
1 . 3 . 3 . 02 . 04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan		
1 . 3 . 3 . 02 . 05	Asrama		
1 . 3 . 3 . 02 . 06	Hotel		
1 . 3 . 3 . 02 . 07	Motel		
1 . 3 . 3 . 02 . 08	Flat/Rumah Susun		
1 . 3 . 3 . 03	Bangunan Menara		
1 . 3 . 3 . 03 . 01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai		
1 . 3 . 3 . 03 . 02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai		
1 . 3 . 3 . 03 . 03	Bangunan Menara Telekomunikasi		
1 . 3 . 3 . 04	Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Istana Peringatan		
1 . 3 . 3 . 04 . 02	Rumah Adat		
1 . 3 . 3 . 04 . 03	Rumah Peninggalan Sejarah		
1 . 3 . 3 . 04 . 04	Makam Sejarah		
1 . 3 . 3 . 04 . 05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah		
1 . 3 . 3 . 05	Tugu Peringatan		
1 . 3 . 3 . 05 . 01	Tugu Kemerdekaan		
1 . 3 . 3 . 05 . 02	Tugu Pembangunan		
1 . 3 . 3 . 05 . 03	Tugu Peringatan Lainnya		
1 . 3 . 3 . 06	Candi		
1 . 3 . 3 . 06 . 01	Candi Hindhu		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 3 . 06 . 02	Candi Budha	D	
1 . 3 . 3 . 06 . 03	Candi Lainnya		
1 . 3 . 3 . 07	Monumen/Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 3 . 07 . 01	Bangunan Bersejarah Lainnya		
1 . 3 . 3 . 08	Tugu Peringatan		
1 . 3 . 3 . 08 . 01	Tugu Peringatan		
1 . 3 . 3 . 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1 . 3 . 3 . 09 . 01	Tugu/Tanda Batas		
1 . 3 . 3 . 10	Rambu-Rambu		
1 . 3 . 3 . 10 . 01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat		
1 . 3 . 3 . 10 . 02	Rambu Tidak Bersuar		
1 . 3 . 3 . 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1 . 3 . 3 . 11 . 01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light		
1 . 3 . 3 . 11 . 02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)		
1 . 3 . 3 . 11 . 03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light		
1 . 3 . 3 . 11 . 04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)		
1 . 3 . 3 . 11 . 05	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal		
1 . 3 . 3 . 11 . 06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light		
1 . 3 . 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1 . 3 . 4 . 01	Jalan		
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan Negara/Nasional		
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jalan Propinsi		
1 . 3 . 4 . 01 . 03	Jalan Kabupaten/Kota		
1 . 3 . 4 . 01 . 04	Jalan Desa		
1 . 3 . 4 . 01 . 05	Jalan Khusus		
1 . 3 . 4 . 01 . 06	Jalan Tol		
1 . 3 . 4 . 01 . 07	Jalan Kereta		
1 . 3 . 4 . 01 . 08	Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1 . 3 . 4 . 02	Jembatan		
1 . 3 . 4 . 02 . 01	Jembatan Negara/Nasional		
1 . 3 . 4 . 02 . 02	Jembatan Propinsi		
1 . 3 . 4 . 02 . 03	Jembatan Kabupaten/Kota		
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Jembatan Desa		
1 . 3 . 4 . 02 . 05	Jembatan Khusus		
1 . 3 . 4 . 02 . 06	Jembatan Pada Jalan Tol		
1 . 3 . 4 . 02 . 07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api		
1 . 3 . 4 . 02 . 08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1 . 3 . 4 . 02 . 09	Jembatan Penyeberangan		
1 . 3 . 4 . 03	Bangunan Air Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 01	Bangunan Waduk Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 02	Bangunan Pengambilan Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 03	Bangunan Pembawa Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 04	Bangunan Pembuang Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 05	Bangunan Pengaman Irigasi		
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Bangunan Pelengkap Irigasi		
1 . 3 . 4 . 04	Bangunan Air Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Bangunan Waduk Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 05	Bangunan Pengaman Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 04 . 07	Bangunan Sawah Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 05	Bangunan Air Rawa		
1 . 3 . 4 . 05 . 01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder		
1 . 3 . 4 . 05 . 02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa		
1 . 3 . 4 . 05 . 03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa		
1 . 3 . 4 . 05 . 04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa		
1 . 3 . 4 . 05 . 05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut		
1 . 3 . 4 . 05 . 06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa		
1 . 3 . 4 . 05 . 07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 4 . 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1 . 3 . 4 . 06 . 01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai		
1 . 3 . 4 . 06 . 02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 4 . 06 . 03	Bangunan Pembuang Pengaman		
1 . 3 . 4 . 06 . 04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
1 . 3 . 4 . 06 . 05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 4 . 06 . 06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 4 . 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
1 . 3 . 4 . 07 . 01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 07 . 02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 07 . 03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 07 . 04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 07 . 05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 07 . 06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 4 . 08	Bangunan Air Bersih/Baku		
1 . 3 . 4 . 08 . 01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 4 . 08 . 02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku		
1 . 3 . 4 . 08 . 03	Bangunan Pembawa Air Bersih		
1 . 3 . 4 . 08 . 04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 4 . 08 . 05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 4 . 09	Bangunan Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 09 . 01	Bangunan Pembawa Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 09 . 02	Bangunan Waduk Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 09 . 03	Bangunan Pembuangan Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 09 . 04	Bangunan Pengaman Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 09 . 05	Bangunan Pelengkap Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 10	Bangunan Air		
1 . 3 . 4 . 10 . 01	Bangunan Air Laut		
1 . 3 . 4 . 10 . 02	Bangunan Air Tawar		
1 . 3 . 4 . 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1 . 3 . 4 . 11 . 01	Instalasi Air Muka Tanah		
1 . 3 . 4 . 11 . 02	Instalasi Air Sumber /Mata Air		
1 . 3 . 4 . 11 . 03	Instalasi Air Tanah Dalam		
1 . 3 . 4 . 11 . 04	Instalasi Air Tanah Dangkal		
1 . 3 . 4 . 11 . 05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1 . 3 . 4 . 12	Instalasi Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 12 . 01	Instalasi Air Kotor		
1 . 3 . 4 . 12 . 02	Instalasi Air Buangan Industri		
1 . 3 . 4 . 12 . 03	Instalasi Air Buangan Pertanian		
1 . 3 . 4 . 13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		
1 . 3 . 4 . 13 . 01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik		
1 . 3 . 4 . 13 . 02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
1 . 3 . 4 . 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1 . 3 . 4 . 14 . 01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1 . 3 . 4 . 15	Instalasi Pembangkit Listrik		
1 . 3 . 4 . 15 . 01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		
1 . 3 . 4 . 15 . 02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
1 . 3 . 4 . 15 . 03	Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)		
1 . 3 . 4 . 15 . 04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)		
1 . 3 . 4 . 15 . 05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
1 . 3 . 4 . 15 . 06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		
1 . 3 . 4 . 15 . 07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		
1 . 3 . 4 . 15 . 08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
1 . 3 . 4 . 15 . 09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)		
1 . 3 . 4 . 15 . 10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)		
1 . 3 . 4 . 15 . 11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)		
1 . 3 . 4 . 16	Instalasi Gardu Listrik		
1 . 3 . 4 . 16 . 01	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1 . 3 . 4 . 16 . 02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
1 . 3 . 4 . 16 . 03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
1 . 3 . 4 . 17	Instalasi Pertahanan		
1 . 3 . 4 . 17 . 01	Instalasi Pertahanan Di Darat		
1 . 3 . 4 . 18	Instalasi Gas		
1 . 3 . 4 . 18 . 01	Instalasi Gardu Gas		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 3 . 4 . 18 . 02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	D	
1 . 3 . 4 . 19	Instalasi Pengaman		
1 . 3 . 4 . 19 . 01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
1 . 3 . 4 . 20	Jaringan Air Minum		
1 . 3 . 4 . 20 . 01	Jaringan Pembawa		
1 . 3 . 4 . 20 . 02	Jaringan Induk Distribusi		
1 . 3 . 4 . 20 . 03	Jaringan Cabang Distribusi		
1 . 3 . 4 . 20 . 04	Jaringan Sambungan ke rumah		
1 . 3 . 4 . 21	Jaringan Listrik		
1 . 3 . 4 . 21 . 01	Jaringan Transmisi		
1 . 3 . 4 . 21 . 02	Jaringan Distribusi		
1 . 3 . 4 . 22	Jaringan Telepon		
1 . 3 . 4 . 22 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah		
1 . 3 . 4 . 22 . 02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah		
1 . 3 . 4 . 22 . 03	Jaringan Telepon Didalam Air		
1 . 3 . 4 . 23	Jaringan Gas		
1 . 3 . 4 . 23 . 01	Jaringan Pipa Gas Transmisi		
1 . 3 . 4 . 23 . 02	Jaringan Pipa Distribusi		
1 . 3 . 4 . 23 . 03	Jaringan Pipa Dinas		
1 . 3 . 4 . 23 . 04	Jaringan BBM		
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya		
1 . 3 . 5 . 01	Buku		
1 . 3 . 5 . 01 . 01	Buku Umum		
1 . 3 . 5 . 01 . 02	Buku Filsafat		
1 . 3 . 5 . 01 . 03	Buku Agama		
1 . 3 . 5 . 01 . 04	Buku Ilmu Sosial		
1 . 3 . 5 . 01 . 05	Buku Ilmu Bahasa		
1 . 3 . 5 . 01 . 06	Buku Matematika & Pengetahuan alam		
1 . 3 . 5 . 01 . 07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
1 . 3 . 5 . 01 . 08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga		
1 . 3 . 5 . 01 . 09	Buku Geografi, Biografi, Sejarah		
1 . 3 . 5 . 02	Terbitan		
1 . 3 . 5 . 02 . 01	Terbitan Berkala		
1 . 3 . 5 . 02 . 02	Terbitan Buku Laporan		
1 . 3 . 5 . 03	Barang-Barang Perpustakaan		
1 . 3 . 5 . 03 . 01	Barang-Barang Perpustakaan Peta		
1 . 3 . 5 . 03 . 02	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)		
1 . 3 . 5 . 03 . 03	Barang-Barang Perpustakaan Musik		
1 . 3 . 5 . 03 . 04	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)		
1 . 3 . 5 . 03 . 05	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita		
1 . 3 . 5 . 03 . 06	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)		
1 . 3 . 5 . 03 . 07	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording		
1 . 3 . 5 . 03 . 08	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)		
1 . 3 . 5 . 03 . 09	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video		
1 . 3 . 5 . 03 . 10	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt		
1 . 3 . 5 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan		
1 . 3 . 5 . 04 . 01	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan		
1 . 3 . 5 . 04 . 02	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan		
1 . 3 . 5 . 04 . 03	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian		
1 . 3 . 5 . 04 . 04	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga		
1 . 3 . 5 . 04 . 05	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan		
1 . 3 . 5 . 04 . 06	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen		
1 . 3 . 5 . 04 . 07	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah		
1 . 3 . 5 . 04 . 08	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan		
1 . 3 . 5 . 05	Alat Olah Raga Lainnya		
1 . 3 . 5 . 05 . 01	Alat Olah Raga Lainnya-Senam		
1 . 3 . 5 . 05 . 02	Alat Olah Raga Air		
1 . 3 . 5 . 05 . 03	Alat Olah Raga Udara		
1 . 3 . 5 . 05 . 04	Alat Olah Raga Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 5 . 06	Hewan	D	
1 . 3 . 5 . 06 . 01	Binatang Ternak		
1 . 3 . 5 . 06 . 02	Binatang Unggas		
1 . 3 . 5 . 06 . 03	Binatang Melata		
1 . 3 . 5 . 06 . 04	Binatang Ikan		
1 . 3 . 5 . 06 . 05	Hewan Kebun Binatang		
1 . 3 . 5 . 06 . 06	Hewan Pengamanan		
1 . 3 . 5 . 07	Tanaman		
1 . 3 . 5 . 07 . 01	Tanaman Perkebunan		
1 . 3 . 5 . 07 . 02	Tanaman Holtikultura		
1 . 3 . 5 . 07 . 03	Tanaman Kehutanan		
1 . 3 . 5 . 07 . 04	Tanaman Hias		
1 . 3 . 5 . 07 . 05	Tanaman Obat dan Kosmetika		
1 . 3 . 5 . 08	Aset Tetap Renovasi		
1 . 3 . 5 . 08 . 01	Aset Tetap Renovasi		
1 . 3 . 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1 . 3 . 6 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan		
1 . 3 . 6 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung		
1 . 3 . 6 . 01 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen		
1 . 3 . 6 . 01 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan		
1 . 3 . 6 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian		
1 . 3 . 6 . 02 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami		
1 . 3 . 6 . 02 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan		
1 . 3 . 6 . 02 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang		
1 . 3 . 6 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan		
1 . 3 . 6 . 03 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan		
1 . 3 . 6 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran		
1 . 3 . 6 . 04 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan		
1 . 3 . 6 . 04 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain		
1 . 3 . 6 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan		
1 . 3 . 6 . 05 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Lebat		
1 . 3 . 6 . 05 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar		
1 . 3 . 6 . 05 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis		
1 . 3 . 6 . 05 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa		
1 . 3 . 6 . 05 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus		
1 . 3 . 6 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan		
1 . 3 . 6 . 06 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Tambak		
1 . 3 . 6 . 06 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar		
1 . 3 . 6 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa		
1 . 3 . 6 . 07 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa		
1 . 3 . 6 . 07 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau		
1 . 3 . 6 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak		
1 . 3 . 6 . 08 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus		
1 . 3 . 6 . 08 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak		
1 . 3 . 6 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
1 . 3 . 6 . 09 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang		
1 . 3 . 6 . 09 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput		
1 . 3 . 6 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain		
1 . 3 . 6 . 10 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian		
1 . 3 . 6 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung		
1 . 3 . 6 . 11 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
1 . 3 . 6 . 11 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		
1 . 3 . 6 . 11 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri		
1 . 3 . 6 . 11 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		
1 . 3 . 6 . 11 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong		
1 . 3 . 6 . 11 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan		
1 . 3 . 6 . 11 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 11 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan		
1 . 3 . 6 . 11 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst		
1 . 3 . 6 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan		
1 . 3 . 6 . 12 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan		
1 . 3 . 6 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
1 . 3 . 6 . 13 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 13 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir		
1 . 3 . 6 . 13 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang		
1 . 3 . 6 . 13 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam		
1 . 3 . 6 . 13 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan		
1 . 3 . 6 . 13 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang		
1 . 3 . 6 . 13 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan		
1 . 3 . 6 . 13 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air		
1 . 3 . 6 . 13 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi		
1 . 3 . 6 . 13 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan		
1 . 3 . 6 . 13 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 6 . 13 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 13 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah		
1 . 3 . 6 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat		
1 . 3 . 6 . 14 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor		
1 . 3 . 6 . 14 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader		
1 . 3 . 6 . 14 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator		
1 . 3 . 6 . 14 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver		
1 . 3 . 6 . 14 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler		
1 . 3 . 6 . 14 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Asphal Equipment		
1 . 3 . 6 . 14 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment		
1 . 3 . 6 . 14 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment		
1 . 3 . 6 . 14 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Loader		
1 . 3 . 6 . 14 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat		
1 . 3 . 6 . 14 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses		
1 . 3 . 6 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung		
1 . 3 . 6 . 15 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger		
1 . 3 . 6 . 15 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator		
1 . 3 . 6 . 15 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger		
1 . 3 . 6 . 15 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik		
1 . 3 . 6 . 15 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung		
1 . 3 . 6 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu		
1 . 3 . 6 . 16 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik		
1 . 3 . 6 . 16 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder		
1 . 3 . 6 . 16 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor		
1 . 3 . 6 . 16 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set		
1 . 3 . 6 . 16 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa		
1 . 3 . 6 . 16 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor		
1 . 3 . 6 . 16 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan		
1 . 3 . 6 . 16 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 16 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
1 . 3 . 6 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
1 . 3 . 6 . 17 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 17 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 6 . 17 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1 . 3 . 6 . 17 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus		
1 . 3 . 6 . 17 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
1 . 3 . 6 . 17 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
1 . 3 . 6 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
1 . 3 . 6 . 18 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
1 . 3 . 6 . 18 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor Berpemumpang		
1 . 3 . 6 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor		
1 . 3 . 6 . 19 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang		
1 . 3 . 6 . 19 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 6 . 19 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
1 . 3 . 6 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1 . 3 . 6 . 20 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang		
1 . 3 . 6 . 20 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang		
1 . 3 . 6 . 20 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus		
1 . 3 . 6 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara		
1 . 3 . 6 . 21 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang		
1 . 3 . 6 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin		
1 . 3 . 6 . 22 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi		
1 . 3 . 6 . 22 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah		
1 . 3 . 6 . 22 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik		
1 . 3 . 6 . 22 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service		
1 . 3 . 6 . 22 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin		
1 . 3 . 6 . 22 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu		
1 . 3 . 6 . 22 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus		
1 . 3 . 6 . 22 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las		
1 . 3 . 6 . 22 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es		
1 . 3 . 6 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
1 . 3 . 6 . 23 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam		
1 . 3 . 6 . 23 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik		
1 . 3 . 6 . 23 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service		
1 . 3 . 6 . 23 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat		
1 . 3 . 6 . 23 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)		
1 . 3 . 6 . 23 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)		
1 . 3 . 6 . 23 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kerja		
1 . 3 . 6 . 23 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi		
1 . 3 . 6 . 23 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu		
1 . 3 . 6 . 23 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit		
1 . 3 . 6 . 23 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Feting		
1 . 3 . 6 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur		
1 . 3 . 6 . 24 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal		
1 . 3 . 6 . 24 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia		
1 . 3 . 6 . 24 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian		
1 . 3 . 6 . 24 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur /Test Klinis Lain		
1 . 3 . 6 . 24 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi		
1 . 3 . 6 . 24 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope		
1 . 3 . 6 . 24 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester		
1 . 3 . 6 . 24 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding		
1 . 3 . 6 . 24 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya		
1 . 3 . 6 . 24 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora		
1 . 3 . 6 . 24 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Timbangan/Biasa		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 24 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering		
1 . 3 . 6 . 24 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL		
1 . 3 . 6 . 24 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu		
1 . 3 . 6 . 24 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Capacitas		
1 . 3 . 6 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan		
1 . 3 . 6 . 25 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		
1 . 3 . 6 . 25 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen/Pengolahan		
1 . 3 . 6 . 25 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan		
1 . 3 . 6 . 25 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian		
1 . 3 . 6 . 25 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian		
1 . 3 . 6 . 25 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Prosesing		
1 . 3 . 6 . 25 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen		
1 . 3 . 6 . 25 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan		
1 . 3 . 6 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1 . 3 . 6 . 26 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman		
1 . 3 . 6 . 26 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen		
1 . 3 . 6 . 26 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan		
1 . 3 . 6 . 26 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium		
1 . 3 . 6 . 26 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan		
1 . 3 . 6 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor		
1 . 3 . 6 . 27 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Tik		
1 . 3 . 6 . 27 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah		
1 . 3 . 6 . 27 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)		
1 . 3 . 6 . 27 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
1 . 3 . 6 . 27 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lainnya		
1 . 3 . 6 . 28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga		
1 . 3 . 6 . 28 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meubelair		
1 . 3 . 6 . 28 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu		
1 . 3 . 6 . 28 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih		
1 . 3 . 6 . 28 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin		
1 . 3 . 6 . 28 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur		
1 . 3 . 6 . 28 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
1 . 3 . 6 . 28 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran		
1 . 3 . 6 . 29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer		
1 . 3 . 6 . 29 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan		
1 . 3 . 6 . 29 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer		
1 . 3 . 6 . 29 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe		
1 . 3 . 6 . 29 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Mini Komputer		
1 . 3 . 6 . 29 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer		
1 . 3 . 6 . 29 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan		
1 . 3 . 6 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		
1 . 3 . 6 . 30 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat		
1 . 3 . 6 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio		
1 . 3 . 6 . 31 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Visual		
1 . 3 . 6 . 31 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film		
1 . 3 . 6 . 31 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A		
1 . 3 . 6 . 31 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak		
1 . 3 . 6 . 31 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Computing		
1 . 3 . 6 . 31 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur		
1 . 3 . 6 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi		
1 . 3 . 6 . 32 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone		
1 . 3 . 6 . 32 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB		
1 . 3 . 6 . 32 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM		
1 . 3 . 6 . 32 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 32 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio UHF		
1 . 3 . 6 . 32 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial		
1 . 3 . 6 . 32 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi		
1 . 3 . 6 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar		
1 . 3 . 6 . 33 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW		
1 . 3 . 6 . 33 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW		
1 . 3 . 6 . 33 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM		
1 . 3 . 6 . 33 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW		
1 . 3 . 6 . 33 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW		
1 . 3 . 6 . 33 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM		
1 . 3 . 6 . 33 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola		
1 . 3 . 6 . 33 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF		
1 . 3 . 6 . 33 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU		
1 . 3 . 6 . 33 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terestrial		
1 . 3 . 6 . 33 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO		
1 . 3 . 6 . 33 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load		
1 . 3 . 6 . 33 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena		
1 . 3 . 6 . 33 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena		
1 . 3 . 6 . 33 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder		
1 . 3 . 6 . 33 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Humidity Control		
1 . 3 . 6 . 33 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Program Input Equipment		
1 . 3 . 6 . 33 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF		
1 . 3 . 6 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran		
1 . 3 . 6 . 34 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum		
1 . 3 . 6 . 34 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi		
1 . 3 . 6 . 34 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
1 . 3 . 6 . 34 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata		
1 . 3 . 6 . 34 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T.H.T		
1 . 3 . 6 . 34 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen		
1 . 3 . 6 . 34 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi		
1 . 3 . 6 . 34 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah		
1 . 3 . 6 . 34 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
1 . 3 . 6 . 34 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam		
1 . 3 . 6 . 34 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mortuary		
1 . 3 . 6 . 34 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak		
1 . 3 . 6 . 34 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set		
1 . 3 . 6 . 34 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh		
1 . 3 . 6 . 34 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)		
1 . 3 . 6 . 34 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jantung		
1 . 3 . 6 . 34 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Nuklir		
1 . 3 . 6 . 34 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi		
1 . 3 . 6 . 34 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin		
1 . 3 . 6 . 34 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat		
1 . 3 . 6 . 34 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa		
1 . 3 . 6 . 34 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan		
1 . 3 . 6 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan		
1 . 3 . 6 . 35 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan		
1 . 3 . 6 . 35 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis		
1 . 3 . 6 . 35 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut		
1 . 3 . 6 . 35 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara		
1 . 3 . 6 . 35 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian		
1 . 3 . 6 . 35 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Olahraga		
1 . 3 . 6 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium		
1 . 3 . 6 . 36 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia Air		
1 . 3 . 6 . 36 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 36 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika		
1 . 3 . 6 . 36 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan		
	Konstruksi		
1 . 3 . 6 . 36 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia		
1 . 3 . 6 . 36 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah		
	dan Batuan		
1 . 3 . 6 . 36 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cocos Tanam		
1 . 3 . 6 . 36 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik		
1 . 3 . 6 . 36 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A		
1 . 3 . 6 . 36 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum		
1 . 3 . 6 . 36 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A		
1 . 3 . 6 . 36 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran		
1 . 3 . 6 . 36 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia		
1 . 3 . 6 . 36 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi A		
1 . 3 . 6 . 36 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film		
1 . 3 . 6 . 36 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Makanan		
1 . 3 . 6 . 36 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi,		
	Kalibrasi dan Instrumentasi		
1 . 3 . 6 . 36 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi		
1 . 3 . 6 . 36 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika		
1 . 3 . 6 . 36 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika		
1 . 3 . 6 . 36 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Peleburan		
1 . 3 . 6 . 36 . 29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pasir		
1 . 3 . 6 . 36 . 30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Pembuatan Cetakan		
1 . 3 . 6 . 36 . 31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Pembuatan Pola		
1 . 3 . 6 . 36 . 32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography		
1 . 3 . 6 . 36 . 33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan		
1 . 3 . 6 . 36 . 34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan		
1 . 3 . 6 . 36 . 35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Pembuatan Logam		
1 . 3 . 6 . 36 . 36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Matrologie		
1 . 3 . 6 . 36 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Pelapisan Logam		
1 . 3 . 6 . 36 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Pengolahan Panas		
1 . 3 . 6 . 36 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Teknologi Textil		
1 . 3 . 6 . 36 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Tekstel		
1 . 3 . 6 . 36 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Teknologi Keramik		
1 . 3 . 6 . 36 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Teknologi Kulit Karet		
1 . 3 . 6 . 36 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet		
	dan Plastik		
1 . 3 . 6 . 36 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Keramik		
1 . 3 . 6 . 36 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses		
	Teknologi Selulosa		
1 . 3 . 6 . 36 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian		
1 . 3 . 6 . 36 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A		
1 . 3 . 6 . 36 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B		
1 . 3 . 6 . 36 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya		
1 . 3 . 6 . 36 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya		
1 . 3 . 6 . 36 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Konversi		
	Batubara dan Biomass		
1 . 3 . 6 . 36 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanografi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 36 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan		
1 . 3 . 6 . 36 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan		
1 . 3 . 6 . 36 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi		
1 . 3 . 6 . 36 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika		
1 . 3 . 6 . 36 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang		
1 . 3 . 6 . 36 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		
1 . 3 . 6 . 36 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri		
1 . 3 . 6 . 36 . 60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja		
1 . 3 . 6 . 36 . 61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan		
1 . 3 . 6 . 36 . 62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis		
1 . 3 . 6 . 36 . 63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lainnya		
1 . 3 . 6 . 36 . 64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A		
1 . 3 . 6 . 37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1 . 3 . 6 . 37 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia		
1 . 3 . 6 . 37 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika		
1 . 3 . 6 . 37 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar		
1 . 3 . 6 . 37 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan		
1 . 3 . 6 . 37 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah		
1 . 3 . 6 . 37 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas		
1 . 3 . 6 . 37 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS		
1 . 3 . 6 . 37 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam		
1 . 3 . 6 . 37 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan		
1 . 3 . 6 . 37 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian		
1 . 3 . 6 . 37 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 37 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP		
1 . 3 . 6 . 37 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		
1 . 3 . 6 . 38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1 . 3 . 6 . 38 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument		
1 . 3 . 6 . 38 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor		
1 . 3 . 6 . 38 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool		
1 . 3 . 6 . 38 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A		
1 . 3 . 6 . 38 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils		
1 . 3 . 6 . 38 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment		
1 . 3 . 6 . 39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1 . 3 . 6 . 39 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector		
1 . 3 . 6 . 39 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scentic		
1 . 3 . 6 . 39 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 39 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display		
1 . 3 . 6 . 39 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply		
1 . 3 . 6 . 39 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device		
1 . 3 . 6 . 39 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics		
1 . 3 . 6 . 39 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator		
1 . 3 . 6 . 39 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System		
1 . 3 . 6 . 40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1 . 3 . 6 . 40 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan		
1 . 3 . 6 . 40 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja		
1 . 3 . 6 . 40 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan		
1 . 3 . 6 . 40 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment		
1 . 3 . 6 . 40 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi		
1 . 3 . 6 . 41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1 . 3 . 6 . 41 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment		
1 . 3 . 6 . 41 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device		
1 . 3 . 6 . 41 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Umum Kedoteran / Klinik Nuklir		
1 . 3 . 6 . 41 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi		
1 . 3 . 6 . 42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan hidup		
1 . 3 . 6 . 42 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah		
1 . 3 . 6 . 42 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara		
1 . 3 . 6 . 42 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran		
1 . 3 . 6 . 42 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Lingkungan		
1 . 3 . 6 . 42 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang		
1 . 3 . 6 . 43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1 . 3 . 6 . 43 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage		
1 . 3 . 6 . 43 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber		
1 . 3 . 6 . 43 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System		
1 . 3 . 6 . 43 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel		
1 . 3 . 6 . 43 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes		
1 . 3 . 6 . 43 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum		
1 . 3 . 6 . 43 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop		
1 . 3 . 6 . 43 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop		
1 . 3 . 6 . 43 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop		
1 . 3 . 6 . 43 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop		
1 . 3 . 6 . 43 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop		
1 . 3 . 6 . 43 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 43 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium		
	Hidrodinamika Pemесinan : Electrical Workshop		
1 . 3 . 6 . 43 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium		
	Hidrodinamika MOB		
1 . 3 . 6 . 43 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium		
	Hidrodinamika Photo and Film Equipment		
1 . 3 . 6 . 44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api		
1 . 3 . 6 . 44 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam		
1 . 3 . 6 . 44 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang		
1 . 3 . 6 . 44 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang		
1 . 3 . 6 . 44 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin		
1 . 3 . 6 . 44 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir		
1 . 3 . 6 . 44 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja		
1 . 3 . 6 . 44 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)		
1 . 3 . 6 . 44 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan		
	Udara (Arhanud)		
1 . 3 . 6 . 44 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal		
1 . 3 . 6 . 44 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri		
1 . 3 . 6 . 44 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-lain		
1 . 3 . 6 . 45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api		
1 . 3 . 6 . 45 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan		
1 . 3 . 6 . 45 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api		
1 . 3 . 6 . 46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi		
1 . 3 . 6 . 46 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum		
1 . 3 . 6 . 46 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat		
1 . 3 . 6 . 47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar		
1 . 3 . 6 . 47 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser		
1 . 3 . 6 . 48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan		
1 . 3 . 6 . 48 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan		
1 . 3 . 6 . 48 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan		
1 . 3 . 6 . 49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1 . 3 . 6 . 49 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor		
1 . 3 . 6 . 49 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang		
1 . 3 . 6 . 49 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel		
1 . 3 . 6 . 49 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi		
1 . 3 . 6 . 49 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium		
1 . 3 . 6 . 49 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan		
1 . 3 . 6 . 49 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opсervatorium		
1 . 3 . 6 . 49 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah		
1 . 3 . 6 . 49 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1 . 3 . 6 . 49 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		
1 . 3 . 6 . 49 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 49 . 12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung		
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
1 . 3 . 6 . 49 . 13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga		
1 . 3 . 6 . 49 . 14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool		
1 . 3 . 6 . 49 . 15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan		
1 . 3 . 6 . 49 . 16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik		
1 . 3 . 6 . 49 . 17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus		
1 . 3 . 6 . 49 . 18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak		
1 . 3 . 6 . 49 . 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Perpustakaan		
1 . 3 . 6 . 49 . 20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum		
1 . 3 . 6 . 49 . 21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung		
	Terminal/Pelabuhan/Bandar		
1 . 3 . 6 . 49 . 22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengujian Kelaikan		
1 . 3 . 6 . 49 . 23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan		
1 . 3 . 6 . 49 . 24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rumah Tahanan		
1 . 3 . 6 . 49 . 25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium		
1 . 3 . 6 . 49 . 26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan		
1 . 3 . 6 . 49 . 27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
1 . 3 . 6 . 50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1 . 3 . 6 . 50 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan I		
1 . 3 . 6 . 50 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 50 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan III		
1 . 3 . 6 . 50 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan		
1 . 3 . 6 . 50 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Asrama		
1 . 3 . 6 . 50 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel		
1 . 3 . 6 . 50 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel		
1 . 3 . 6 . 50 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun		
1 . 3 . 6 . 51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara		
1 . 3 . 6 . 51 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai		
1 . 3 . 6 . 51 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai		
1 . 3 . 6 . 51 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi		
1 . 3 . 6 . 52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 6 . 52 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Istana Peringatan		
1 . 3 . 6 . 52 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Adat		
1 . 3 . 6 . 52 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Peninggalan Sejarah		
1 . 3 . 6 . 52 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah		
1 . 3 . 6 . 52 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah		
1 . 3 . 6 . 53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan		
1 . 3 . 6 . 53 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Kemerdekaan		
1 . 3 . 6 . 53 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan		
1 . 3 . 6 . 53 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya		
1 . 3 . 6 . 54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi		
1 . 3 . 6 . 54 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu		
1 . 3 . 6 . 54 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha		
1 . 3 . 6 . 54 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya		
1 . 3 . 6 . 55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
1 . 3 . 6 . 55 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah Lainnya		
1 . 3 . 6 . 56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1 . 3 . 6 . 56 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan		
1 . 3 . 6 . 56 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas		
1 . 3 . 6 . 57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu		
1 . 3 . 6 . 57 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat		
1 . 3 . 6 . 57 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar		
1 . 3 . 6 . 58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1 . 3 . 6 . 58 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light		
1 . 3 . 6 . 58 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)		
1 . 3 . 6 . 58 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light		
1 . 3 . 6 . 58 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)		
1 . 3 . 6 . 58 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal		
1 . 3 . 6 . 58 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light		
1 . 3 . 6 . 59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan		
1 . 3 . 6 . 59 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional		
1 . 3 . 6 . 59 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi		
1 . 3 . 6 . 59 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota		
1 . 3 . 6 . 59 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa		
1 . 3 . 6 . 59 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus		
1 . 3 . 6 . 59 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol		
1 . 3 . 6 . 59 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta		
1 . 3 . 6 . 59 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1 . 3 . 6 . 60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan		
1 . 3 . 6 . 60 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional		
1 . 3 . 6 . 60 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propinsi		
1 . 3 . 6 . 60 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota		
1 . 3 . 6 . 60 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa		
1 . 3 . 6 . 60 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 60 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol		
1 . 3 . 6 . 60 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api		
1 . 3 . 6 . 60 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang		
1 . 3 . 6 . 60 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan		
1 . 3 . 6 . 61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi		
1 . 3 . 6 . 61 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi		
1 . 3 . 6 . 62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 62 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pasang Surut		
1 . 3 . 6 . 63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa		
1 . 3 . 6 . 63 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder		
1 . 3 . 6 . 63 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa		
1 . 3 . 6 . 63 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa		
1 . 3 . 6 . 63 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa		
1 . 3 . 6 . 63 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Surut		
1 . 3 . 6 . 63 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa		
1 . 3 . 6 . 63 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa		
1 . 3 . 6 . 64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1 . 3 . 6 . 64 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai		
1 . 3 . 6 . 64 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 6 . 64 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman		
1 . 3 . 6 . 64 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai		
1 . 3 . 6 . 64 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 6 . 64 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai		
1 . 3 . 6 . 65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
1 . 3 . 6 . 65 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 65 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 65 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 65 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 65 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 65 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air		
1 . 3 . 6 . 66	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku		
1 . 3 . 6 . 66 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 6 . 66 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku		
1 . 3 . 6 . 66 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih		
1 . 3 . 6 . 66 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 6 . 66 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku		
1 . 3 . 6 . 67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 67 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 67 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Kotor		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 67 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuangan Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 67 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 67 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 68	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air		
1 . 3 . 6 . 68 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut		
1 . 3 . 6 . 68 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar		
1 . 3 . 6 . 69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1 . 3 . 6 . 69 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah		
1 . 3 . 6 . 69 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air		
1 . 3 . 6 . 69 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dalam		
1 . 3 . 6 . 69 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dangkal		
1 . 3 . 6 . 69 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1 . 3 . 6 . 70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 70 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor		
1 . 3 . 6 . 70 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri		
1 . 3 . 6 . 70 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian		
1 . 3 . 6 . 71	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah		
1 . 3 . 6 . 71 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik		
1 . 3 . 6 . 71 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik		
1 . 3 . 6 . 72	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1 . 3 . 6 . 72 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1 . 3 . 6 . 73	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik		
1 . 3 . 6 . 73 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		
1 . 3 . 6 . 73 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		
1 . 3 . 6 . 73 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro)		
1 . 3 . 6 . 73 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)		
1 . 3 . 6 . 73 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		
1 . 3 . 6 . 73 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		
1 . 3 . 6 . 73 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		
1 . 3 . 6 . 73 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)		
1 . 3 . 6 . 73 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		
1 . 3 . 6 . 73 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)		
1 . 3 . 6 . 73 . 11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)		
1 . 3 . 6 . 74	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik		
1 . 3 . 6 . 74 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Induk		
1 . 3 . 6 . 74 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi		
1 . 3 . 6 . 74 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik		
1 . 3 . 6 . 75	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan		
1 . 3 . 6 . 75 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat		
1 . 3 . 6 . 76	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas		
1 . 3 . 6 . 76 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas		
1 . 3 . 6 . 76 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas		
1 . 3 . 6 . 77	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman		
1 . 3 . 6 . 77 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir		
1 . 3 . 6 . 78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum		
1 . 3 . 6 . 78 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa		
1 . 3 . 6 . 78 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi		
1 . 3 . 6 . 78 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi		
1 . 3 . 6 . 78 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah		
1 . 3 . 6 . 79	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik		
1 . 3 . 6 . 79 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi		
1 . 3 . 6 . 79 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi		
1 . 3 . 6 . 80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon		
1 . 3 . 6 . 80 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di atas Tanah		
1 . 3 . 6 . 80 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah		
1 . 3 . 6 . 80 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Didalam Air		
1 . 3 . 6 . 81	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas		
1 . 3 . 6 . 81 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Gas Transmisi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 81 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Distribusi		
1 . 3 . 6 . 81 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas		
1 . 3 . 6 . 81 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan BBM		
1 . 3 . 6 . 82	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku		
1 . 3 . 6 . 82 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum		
1 . 3 . 6 . 82 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat		
1 . 3 . 6 . 82 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Agama		
1 . 3 . 6 . 82 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial		
1 . 3 . 6 . 82 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa		
1 . 3 . 6 . 82 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan Alam		
1 . 3 . 6 . 82 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
1 . 3 . 6 . 82 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 82 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah		
1 . 3 . 6 . 83	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan		
1 . 3 . 6 . 83 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala		
1 . 3 . 6 . 83 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan		
1 . 3 . 6 . 84	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
1 . 3 . 6 . 84 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Peta		
1 . 3 . 6 . 84 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Naskah (Manuskrip)		
1 . 3 . 6 . 84 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Musik		
1 . 3 . 6 . 84 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Karya Grafika (Graphic Material)		
1 . 3 . 6 . 84 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Three Dimensional Artetacs and Realita		
1 . 3 . 6 . 84 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Bentuk Micro (Microform)		
1 . 3 . 6 . 84 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Rekaman Suara Sound Recording		
1 . 3 . 6 . 84 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Berkas Komputer (Computer Files)		
1 . 3 . 6 . 84 . 09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Film Bergerak dan Rekaman Video		
1 . 3 . 6 . 84 . 10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
	Tarscalt		
1 . 3 . 6 . 85	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan		
1 . 3 . 6 . 85 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Pahatan		
1 . 3 . 6 . 85 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Lukisan		
1 . 3 . 6 . 85 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Alat Kesenian		
1 . 3 . 6 . 85 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Alat Olah Raga		
1 . 3 . 6 . 85 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Tanda Penghargaan		
1 . 3 . 6 . 85 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen		
1 . 3 . 6 . 85 . 07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah		
1 . 3 . 6 . 85 . 08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak		
	Kebudayaan-Barang Kerajinan		
1 . 3 . 6 . 86	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya		
1 . 3 . 6 . 86 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam		
1 . 3 . 6 . 86 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air		
1 . 3 . 6 . 86 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara		
1 . 3 . 6 . 86 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya		
1 . 3 . 6 . 87	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan		
1 . 3 . 6 . 87 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak		
1 . 3 . 6 . 87 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Unggas		
1 . 3 . 6 . 87 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata		
1 . 3 . 6 . 87 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ikan		
1 . 3 . 6 . 87 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 3 . 6 . 87 . 06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan	D	
1 . 3 . 6 . 88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman		
1 . 3 . 6 . 88 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan		
1 . 3 . 6 . 88 . 02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura		
1 . 3 . 6 . 88 . 03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan		
1 . 3 . 6 . 88 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias		
1 . 3 . 6 . 88 . 05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika		
1 . 3 . 6 . 89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi		
1 . 3 . 6 . 89 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi		
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan		
1 . 3 . 7 . 01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat		
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung		
1 . 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu		
1 . 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		
1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor		
1 . 3 . 7 . 01 . 07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1 . 3 . 7 . 01 . 08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara		
1 . 3 . 7 . 01 . 09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin		
1 . 3 . 7 . 01 . 10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin		
1 . 3 . 7 . 01 . 11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur		
1 . 3 . 7 . 01 . 12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan		
1 . 3 . 7 . 01 . 13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1 . 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor		
1 . 3 . 7 . 01 . 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga		
1 . 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Komputer		
1 . 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1 . 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio		
1 . 3 . 7 . 01 . 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi		
1 . 3 . 7 . 01 . 20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar		
1 . 3 . 7 . 01 . 21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran		
1 . 3 . 7 . 01 . 22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan		
1 . 3 . 7 . 01 . 23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium		
1 . 3 . 7 . 01 . 24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1 . 3 . 7 . 01 . 25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1 . 3 . 7 . 01 . 26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1 . 3 . 7 . 01 . 27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1 . 3 . 7 . 01 . 28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1 . 3 . 7 . 01 . 29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1 . 3 . 7 . 01 . 30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1 . 3 . 7 . 01 . 31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api		
1 . 3 . 7 . 01 . 32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api		
1 . 3 . 7 . 01 . 33	Akumulasi Penyusutan Amunisi		
1 . 3 . 7 . 01 . 34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar		
1 . 3 . 7 . 01 . 35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan		
1 . 3 . 7 . 02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1 . 3 . 7 . 02 . 02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1 . 3 . 7 . 02 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara		
1 . 3 . 7 . 02 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah		
1 . 3 . 7 . 02 . 05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan		
1 . 3 . 7 . 02 . 06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi		
1 . 3 . 7 . 02 . 07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
1 . 3 . 7 . 02 . 08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1 . 3 . 7 . 02 . 09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu		
1 . 3 . 7 . 02 . 10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1 . 3 . 7 . 03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan		
1 . 3 . 7 . 03 . 02	Akumulasi Penyusutan Jembatan		
1 . 3 . 7 . 03 . 03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut		
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa		
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku		
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor		
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air		
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor		
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah		
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik		
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik		
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan		
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas		
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman		
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum		
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik		
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon		
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas		
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi		
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	D	
1.4.1.01	Dana Cadangan		
1.4.1.01.01	Dana Cadangan		
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	D	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran		
1.5.1.01.01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III		
1.5.1.01.02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas		
1.5.1.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.1.02.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		
1.5.1.02.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara		
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	D	
1.5.2.01	Sewa		
1.5.2.01.01	Sewa		
1.5.2.02	Kerjasama Pemanfaatan		
1.5.2.02.01	Kerjasama Pemanfaatan		
1.5.2.03	Bangun guna serah		
1.5.2.03.01	Bangun guna serah		
1.5.2.04	Bangun serah guna		
1.5.2.04.01	Bangun serah guna		
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	D	
1.5.3.01	Goodwill		
1.5.3.01.01	Goodwill		
1.5.3.01.02	Dst.....		
1.5.3.02	Lisensi dan frenchise		
1.5.3.02.01	Lisensi dan frenchise		
1.5.3.02.02	Dst.....		
1.5.3.03	Hak Cipta		
1.5.3.03.01	Hak Cipta		
1.5.3.03.02	Dst.....		
1.5.3.04	Paten		
1.5.3.04.01	Paten		
1.5.3.04.02	Dst.....		
1.5.3.05	Aset Tidat Berwujud Lainnya		
1.5.3.05.01	Software		
1.5.3.05.02	Kajian		
1.5.3.05.03	Dst.....		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
1 . 5 . 3 . 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	D	
1 . 5 . 3 . 06 . 01	Akumulasi Amortisasi Goodwill		
1 . 5 . 3 . 06 . 02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise		
1 . 5 . 3 . 06 . 03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta		
1 . 5 . 3 . 06 . 04	Akumulasi Amortisasi Paten		
1 . 5 . 3 . 06 . 05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya		
1 . 5 . 4	Aset Lain-lain		
1 . 5 . 4 . 01	Aset Lain-lain		
1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain.....		
1 . 5 . 4 . 01 . 02	Dst.....		
1 . 5 . 4 . 02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		
1 . 5 . 4 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		
1 . 5 . 4 . 02 . 02	Dst.....		
2	KEWAJIBAN	K	
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2 . 1 . 1 . 01	Utang Taspen		
2 . 1 . 1 . 01 . 01	Utang Taspen		
2 . 1 . 1 . 01 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 1 . 02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
2 . 1 . 1 . 02 . 01	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
2 . 1 . 1 . 02 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 1 . 03	Utang PPh Pusat		
2 . 1 . 1 . 03 . 01	Utang PPh 21		
2 . 1 . 1 . 03 . 02	Utang PPh 22		
2 . 1 . 1 . 03 . 03	Utang PPh 23		
2 . 1 . 1 . 03 . 04	Utang PPh 25		
2 . 1 . 1 . 03 . 05	Utang PPh Ps 4 (2)		
2 . 1 . 1 . 03 . 06	Utang PPh 15		
2 . 1 . 1 . 03 . 07	Utang PPh 26		
2 . 1 . 1 . 04	Utang PPN Pusat		
2 . 1 . 1 . 04 . 01	Utang PPN Pusat		
2 . 1 . 1 . 04 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 1 . 05	Utang Taperum		
2 . 1 . 1 . 05 . 01	Utang Taperum		
2 . 1 . 1 . 05 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 1 . 06	Utang Iuran Wajib Pegawai		
2 . 1 . 1 . 06 . 01	Utang Iuran Wajib Pegawai		
2 . 1 . 1 . 06 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 1 . 07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		
2 . 1 . 1 . 07 . 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		
2 . 1 . 1 . 07 . 02	Utang Sewa Rumah		
2 . 1 . 1 . 07 . 03	Utang Beras (BULOG)		
2 . 1 . 1 . 08	Utang Jaminan		
2 . 1 . 1 . 08 . 01	Utang Jaminan		
2 . 1 . 1 . 08 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 2	Utang Bunga		
2 . 1 . 2 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah		
2 . 1 . 2 . 01 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah		
2 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 2 . 02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 1 . 2 . 02 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 2 . 03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD		
2 . 1 . 2 . 03 . 01	Utang Bunga Kepada BUMN		
2 . 1 . 2 . 03 . 02	Utang Bunga Kepada BUMD		
2 . 1 . 2 . 03 . 03	Dst.....		
2 . 1 . 2 . 04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 1 . 2 . 04 . 01	Utang Bunga kepada Bank		
2 . 1 . 2 . 04 . 02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 1 . 2 . 04 . 03	Dst.....		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN	
		NORMAL		
2 . 1 . 2 . 05	Utang Bunga Obligasi			
2 . 1 . 2 . 05 . 01	Utang Bunga Obligasi.....			
2 . 1 . 2 . 05 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya			
2 . 1 . 2 . 06 . 01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya			
2 . 1 . 2 . 06 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri			
2 . 1 . 2 . 07 . 01	Utang Bunga Luar Negeri			
2 . 1 . 2 . 07 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			K
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan			
2 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan			
2 . 1 . 3 . 01 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
2 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
2 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat			
2 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat			
2 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya			
2 . 1 . 3 . 04 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya			
2 . 1 . 3 . 04 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota			
2 . 1 . 3 . 05 . 01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota			
2 . 1 . 3 . 05 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 4	Pendapatan Diterima Dimuka	K		
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III			
2 . 1 . 4 . 01 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III			
2 . 1 . 4 . 01 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III			
2 . 1 . 4 . 02 . 01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III			
2 . 1 . 4 . 02 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah			
2 . 1 . 4 . 03 . 01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah			
2 . 1 . 4 . 03 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya			
2 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya			
2 . 1 . 4 . 04 . 02	Dst.....			
2 . 1 . 5	Utang Beban	K		
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai			
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai			
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa			
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa			
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga			
2 . 1 . 5 . 03 . 01	Utang Beban Bunga			
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi			
2 . 1 . 5 . 04 . 01	Utang Beban Subsidi			
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah			
2 . 1 . 5 . 05 . 01	Utang Beban Hibah			
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial			
2 . 1 . 5 . 06 . 01	Utang Beban Bantuan Sosial			
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer			
2 . 1 . 5 . 07 . 01	Utang Beban Transfer			
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain			
2 . 1 . 5 . 08 . 01	Utang Beban Lain-lain			
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	K		
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD			
2 . 1 . 6 . 01 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak			
2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
2 . 1 . 6 . 01 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
2 . 1 . 6 . 01 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah		
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
2 . 1 . 6 . 02 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
2 . 1 . 6 . 02 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
2 . 1 . 6 . 02 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 1 . 6 . 02 . 04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 1 . 6 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
2 . 1 . 6 . 03 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah		
2 . 1 . 6 . 03 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya		
2 . 1 . 6 . 04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2 . 1 . 6 . 04 . 01	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2 . 1 . 6 . 04 . 02	Dst.....		
2 . 1 . 6 . 05	Utang Pengadaan Aset Tetap		
2 . 1 . 6 . 05 . 01	Utang Pengadaan Aset Tetap		
2 . 1 . 6 . 06	Utang Pembiayaan		
2 . 1 . 6 . 06 . 01	Utang Pembiayaan		
2 . 1 . 7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	K	
2 . 1 . 7 . 01	R/K PPKD		
2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD		
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	K	
2 . 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2 . 2 . 1 . 01 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2 . 2 . 1 . 02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 2 . 1 . 02 . 01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 2 . 1 . 03	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
2 . 2 . 1 . 03 . 01	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
2 . 2 . 1 . 04	Utang Pemerintah Pusat		
2 . 2 . 1 . 04 . 01	Utang Pemerintah Pusat		
2 . 2 . 1 . 05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 2 . 1 . 05 . 01	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 2 . 1 . 06	Utang Dalam Negeri Lainnya		
2 . 2 . 1 . 06 . 01	Utang Dalam Negeri Lainnya		
2 . 2 . 2	Utang Jangka Panjang Lainnya	K	
2 . 2 . 2 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya		
2 . 2 . 2 . 01 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya		
3	EKUITAS		
3 . 1	EKUITAS		
3 . 1 . 1	Ekuitas	K	
3 . 1 . 1 . 01	Ekuitas		
3 . 1 . 1 . 01 . 01	Ekuitas		
3 . 1 . 1 . 02	Koreksi Ekuitas		
3 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Nilai Persediaan		
3 . 1 . 1 . 02 . 02	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
3 . 1 . 1 . 02 . 03	Koreksi ekuitas lainnya		
3 . 1 . 2	Surplus/Defisit LO	K	
3 . 1 . 2 . 01	Surplus/Defisit LO		
3 . 1 . 2 . 01 . 01	Surplus/Defisit LO		
4	PENDAPATAN - LRA		
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA		
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	K	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 01	Hotel - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 02	Motel - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Cottage - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 04	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 05	Wisma Pariwisata - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Gubuk Pariwisata - LRA		
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA		
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Restoran - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 02	Rumah Makan - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 03	Kafetaria - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 04	Kantin - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 05	Warung - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 06	Bar - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 07	Jasa Boga/ Katering - LRA		
4 . 1 . 1 . 07 . 08	Mie Bakso - LRA		
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Tontonan Film/Bioskop - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 04	Pameran - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Balap Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 11	Kolam Renang/Obyek Wisata - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 12	Mainan Anak/Video Game/Internet - LRA		
4 . 1 . 1 . 08 . 13	Hiburan Interaktif - LRA		
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Reklame - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 02	Reklame Kain - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 03	Reklame Melekat/Stiker - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 04	Reklame Selebaran - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 05	Reklame Berjalan - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 06	Reklame Udara - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 07	Reklame Apung - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 08	Reklame Suara - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 09	Reklame Film/Slide - LRA		
4 . 1 . 1 . 09 . 10	Reklame Peragaan - LRA		
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA		
4 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN - LRA		
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA		
4 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LRA		
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA		
4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Bawah Tanah - LRA		
4 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu Setengah Permata - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LRA	K	
4 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 38	Batu Gunung/Kali - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 39	Sirtu - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 40	Pasir - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 41	Tanah Timbun - LRA		
4 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Pecah/Kerikil - LRA		
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA		
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) - LRA		
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA		
4 . 1 . 1 . 16 . 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA		
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA		
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA		
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
4 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA		
4 . 1 . 2 . 04 . 01	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA		
4 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA		
4 . 1 . 2 . 05 . 01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA		
4 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA		
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA		
4 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA		
4 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA		
4 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
4 . 1 . 2 . 08 . 01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
4 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA		
4 . 1 . 2 . 09 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA		
4 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA		
4 . 1 . 2 . 10 . 01	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA		
4 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA		
4 . 1 . 2 . 11 . 01	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LRA		
4 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA		
4 . 1 . 2 . 12 . 01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA		
4 . 1 . 2 . 13 . 01	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA		
4 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		
4 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 15 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA		
4 . 1 . 2 . 16 . 01	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan - LRA		
4 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA		
4 . 1 . 2 . 17 . 01	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA		
4 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LRA		
4 . 1 . 2 . 18 . 01	Retribusi Terminal - LRA		
4 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA		
4 . 1 . 2 . 19 . 01	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA		
4 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA		
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA		
4 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA		
4 . 1 . 2 . 21 . 01	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA		
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA		
4 . 1 . 2 . 22 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA		
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA		
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA		
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA		
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Retribusi Penyeberangan di Air - LRA		
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA		
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA		
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA		
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA		
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LRA		
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Retribusi Izin Gangguan - LRA		
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LRA		
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Retribusi Izin Trayek - LRA		
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LRA		
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LRA		
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA		
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA		
4 . 1 . 2 . 33	Retribusi Bongkar Muat - LRA		
4 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Bongkar Muat - LRA		
4 . 1 . 2 . 34	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LRA		
4 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LRA		
4 . 1 . 2 . 35	Retribusi Leges - LRA		
4 . 1 . 2 . 35 . 01	Retribusi Leges - LRA		
4 . 1 . 2 . 36	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LRA		
4 . 1 . 2 . 36 . 01	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LRA		
4 . 1 . 2 . 37	Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan - LRA		
4 . 1 . 2 . 37 . 01	Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan - LRA		
4 . 1 . 2 . 38	Retribusi Izin Usaha Perdagangan - LRA		
4 . 1 . 2 . 38 . 01	Retribusi Izin Usaha Perdagangan - LRA		
4 . 1 . 2 . 39	Retribusi Izin Usaha Industri - LRA		
4 . 1 . 2 . 39 . 01	Retribusi Izin Usaha Industri - LRA		
4 . 1 . 2 . 40	Retribusi Izin Pertambangan Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 40 . 01	Retribusi Izin Pertambangan Daerah - LRA		
4 . 1 . 2 . 41	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LRA		
4 . 1 . 2 . 41 . 01	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LRA		
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	K	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		
4 . 1 . 3 . 01 . 01	BPRS Al-Madina - LRA		
4 . 1 . 3 . 01 . 02	BUMD Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	K	
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LRA		
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA		
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta - LRA		
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA		
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Pelepasan Hak Atas Tanah - LRA		
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA		
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA		
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA		
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA		
4 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA		
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA		
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LRA		
4 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA		
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		
4 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA		
4 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA		
4 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA		
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA		
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LRA		
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA		
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA		
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA		
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA		
4 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA		
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA		
4 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LRA		
4 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LRA		
4 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LRA		
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA		
4 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA		
4 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA		
4 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA		
4 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA		
4 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA		
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian		
4 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksa - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 07	Pendapatan dari Pengembalian Pinjaman Modal - LRA		
4 . 1 . 4 . 13 . 08	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA		
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA		
4 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA		
4 . 1 . 4 . 14 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA		
4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA		
4 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA		
4 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA		
4 . 1 . 4 . 15 . 03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah		
4 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA		
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA		
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA		
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA		
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA		
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA		
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA		
4 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA		
4 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA		
4 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA		
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Denda Adm. Keterlambatan Pendaftaran Akta-akta selain Akta Kelahiran - LRA		
4 . 1 . 4 . 19 . 02	Pendapatan Sewa Kekayaan Daerah (Kolam, Sawah, Tanah Darat) - LRA		
4 . 1 . 4 . 19 . 03	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA		
4 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LRA		
4 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA		
4 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA		
4 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA		
4 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA		
4 . 1 . 4 . 22	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir		
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA		
4 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA		
4 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA		
4 . 1 . 4 . 24	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKTP - LRA		
4 . 1 . 4 . 24 . 01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKTP - LRA		
4 . 1 . 4 . 25	Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 01	Ijin Jalan Masuk dan Penggunaan Trotoar - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 02	Penutupan Selokan - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 03	Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/Advice Planing - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 04	Dana Bergulir Koperasi - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 05	DAKABALAREA - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 06	PINBUK - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 07	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 08	Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 09	Tanda Daftar Gudang (TDG) - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 10	Tera Ulang - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 11	Kolam Renang - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 12	PT. Bina Kayu Lestari - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 13	PT. Dahana - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 14	Biaya Nikah - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 15	Pengusaha MCK - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 16	Tasik Fair - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 17	Pendapatan Bidang Pertanian - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 18	Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 19	Pasar Modern - LRA		
4 . 1 . 4 . 25 . 20	Tempat Rekreasi Urug - LRA		
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA		
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	K	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Psl 25 dan Psl 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pemerataan Pajak - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LRA		
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LRA		
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA		
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA		
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		
4 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LRA		
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LRA		
4 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN		
		NORMAL			
4 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 20	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 23	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Non Fisik - Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD -LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Non Fisik - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 26	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA				
4 . 2 . 1 . 04 . 27	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LRA				
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA			K	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA				
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LRA				
4 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA				
4 . 2 . 2 . 02	Dana Keistemewaan - LRA				
4 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistemewaan - LRA				
4 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA				
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Dana Penyesuaian Tunjangan Tenaga Kependidikan - LRA				
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	K			
4 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA				
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA				
4 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA				
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA				
4 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA				
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA				
4 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LRA	K			
4 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA				
4 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA				
4 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA				
4 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA				
4 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA				
4 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA				
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	K			
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LRA				
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA				
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
4 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				
4 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA				

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
4.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA		
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA		
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA		
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA		
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA		
4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA		
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LRA		
4.3.2	Dana Darurat - LRA	K	
4.3.2.01	Dana Darurat - LRA		
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA		
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	K	
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA		
4.3.3.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA		
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.1	Belanja Pegawai	D	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA		
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA		
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga - LRA		
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan - LRA		
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional - LRA		
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum - LRA		
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras - LRA		
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA		
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji - LRA		
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan - LRA		
5.1.1.01.10	Belanja Uang Paket - LRA		
5.1.1.01.11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah - LRA		
5.1.1.01.12	Belanja Tunjangan Komisi - LRA		
5.1.1.01.13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran - LRA		
5.1.1.01.14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan - LRA		
5.1.1.01.15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LRA		
5.1.1.01.16	Belanja Tunjangan Perumahan - LRA		
5.1.1.01.17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas - LRA		
5.1.1.01.18	Belanja Uang Jasa Pengabdian - LRA		
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LRA		
5.1.1.01.20	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD - LRA		
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - LRA		
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA		
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LRA		
5.1.1.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LRA		
5.1.1.02.03	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LRA		
5.1.1.02.04	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LRA		
5.1.1.02.05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LRA		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LRA		
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA		
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan/CPNSD - LRA		
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LRA		
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LRA		
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH - LRA		
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LRA		
5.1.1.04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LRA		
5.1.1.04.01	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LRA		
5.1.1.04.02	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LRA		
5 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LRA		
5 . 1 . 1 . 04 . 05	Belanja Biaya Pemungutan PBB - LRA		
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA		
5 . 1 . 1 . 05 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LRA		
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 02	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 03	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 04	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Pasar - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 07	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 08	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 09	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	D	
5 . 1 . 1 . 06 . 17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA		
5 . 1 . 1 . 06 . 32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA		
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur - LRA		
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS - LRA		
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS - LRA		
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi dan Desain - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 10	Belanja Dokumentasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 11	Belanja Cinderamata - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 12	Belanja Trophy - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Pandel - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 14	Belanja Pengisian Freon AC - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 15	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 16	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 17	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 18	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pertanian - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 19	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Industri - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Meubelair - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 21	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Medis - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 22	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 23	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 24	Belanja Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 25	Belanja Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 26	Belanja Sarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 27	Belanja Prasarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 29	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 1 . 2 . 01 . 30	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Studio - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 31	Belanja Kendaraan Bermotor dan/Tidak Bermotor - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 32	Belanja Sarana Penanganan Bencana - LRA		
5 . 1 . 2 . 01 . 33	Belanja Prasarana Penanganan Bencana - LRA		
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan obat-obatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Praktek/Percontohan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pangan/Pakan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Bibit/Benih Perikanan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan PBM/KBM - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 10	Belanja Material Alat Penunjang - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Baku Jalan/Jembatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 02 . 12	Belanja Persediaan Makanan Pokok - LRA		
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service/Perbaikan - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pencucian - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pembuangan Limbah/Sampah - LRA		
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Kantor Lainnya - LRA		
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi - LRA		
5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja - LRA		
5 . 1 . 2 . 04 . 04	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan - LRA		
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - LRA		
5 . 1 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi - LRA		
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA		
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak - LRA		
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan - LRA		
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan - LRA		
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LRA		
5 . 1 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas - LRA		
5 . 1 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat - LRA		
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - LRA		
5 . 1 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas - LRA		
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Gudang - LRA		
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA		
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 1 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air - LRA		
5 . 1 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara - LRA		
5 . 1 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat - LRA		
5 . 1 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator - LRA		
5 . 1 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser - LRA		
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Peralatan Kesenian - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Percontohan - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Studio dan Kelengkapannya - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Dekorasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Air Conditioner (AC) - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Pompa Air - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Panggung - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Televisi - LRA		
5 . 1 . 2 . 10 . 17	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan - LRA		
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman - LRA		
5 . 1 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai - LRA		
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - LRA		
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu - LRA		
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan - LRA		
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 09	Belanja Pakaian Linmas/Hansip - LRA		
5 . 1 . 2 . 12 . 10	Belanja Kelengkapan Pakaian Dinas - LRA		
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja - LRA		
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - LRA		
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Drumband/Marching Band - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Peresmian - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Khusus Ibadah - LRA		
5 . 1 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Khusus Peserta - LRA		
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas - LRA		
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - LRA		
5 . 1 . 2 . 16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas - LRA		
5 . 1 . 2 . 16 . 01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 16 . 02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 17	Belanja Pemulangan Pegawai - LRA		
5 . 1 . 2 . 17 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 17 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah - LRA		
5 . 1 . 2 . 17 . 03	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan - LRA		
5 . 1 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Tanah - LRA		
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LRA		
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA		
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA		
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - LRA		
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Advokat/Pengacara - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Rekrutmen SDM - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Keamanan - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer (EO) - LRA		
5 . 1 . 2 . 19 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Telekomunikasi dan Informasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - LRA		
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - LRA		
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LRA		
5 . 1 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat - LRA		
5 . 1 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga - LRA		
5 . 1 . 2 . 22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 22 . 01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 - LRA		
5 . 1 . 2 . 22 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 - LRA		
5 . 1 . 2 . 22 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 - LRA		
5 . 1 . 2 . 22 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 - LRA		
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan - LRA		
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis - LRA		
5 . 1 . 2 . 24	Belanja Honorarium Non Pegawai - LRA		
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LRA		
5 . 1 . 2 . 24 . 02	Belanja Moderator - LRA		
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LRA		
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Belanja Honorarium PNS Lainnya - LRA		
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Honorarium Pelayanan Kesehatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 26	Belanja Honorarium Non PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
5 . 1 . 2 . 26 . 02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 04	Honorarium Pejabat Negara - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 05	Honorarium Pegawai Negeri Bukan Sipil - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 06	Honorarium Tokoh Masyarakat - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 07	Honorarium Pelayanan Kesehatan - LRA		
5 . 1 . 2 . 26 . 08	Moderator - LRA		
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - LRA		
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga - LRA		
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat - LRA		
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS - LRA		
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS - LRA		
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS - LRA		
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LRA		
5 . 1 . 2 . 30	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Non PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan - LRA		
5 . 1 . 2 . 30 . 02	Belanja Sosialisasi - LRA		
5 . 1 . 2 . 30 . 03	Belanja Bimbingan Teknis - LRA		
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Jasa Ahli PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Jasa Ahli Non PNS - LRA		
5 . 1 . 2 . 32 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN		
		NORMAL			
5 . 1 . 2 . 33	Belanja Jasa Pembongkaran - LRA	D			
5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Jasa Pembongkaran Bangunan Gedung - LRA				
5 . 1 . 3	Belanja Bunga				
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN - LRA				
5 . 1 . 3 . 01 . 07	Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya - LRA				
5 . 1 . 3 . 02	Belanja Bunga Utang Obligasi - LRA				
5 . 1 . 3 . 02 . 01	Belanja Bunga Utang Obligasi - LRA				
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	D			
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Subsidi - LRA				
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada BUMN - LRA				
5 . 1 . 4 . 01 . 02	Belanja Subsidi kepada BUMD - LRA				
5 . 1 . 4 . 01 . 03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya - LRA				
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	D			
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah - LRA				
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah - LRA				
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya - LRA				
5 . 1 . 5 . 02 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi - LRA				
5 . 1 . 5 . 02 . 02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten - LRA				
5 . 1 . 5 . 02 . 03	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota - LRA				
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA				
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA				
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LRA	D			
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat - LRA				
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LRA				
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan - LRA				
5 . 1 . 5 . 06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar - LRA				
5 . 1 . 5 . 06 . 01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.... - LRA				
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial				
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan - LRA				
5 . 1 . 6 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan - LRA				
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat - LRA				
5 . 1 . 6 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada - LRA				
5 . 2	BELANJA MODAL			D	
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah				
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan - LRA				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung - LRA				
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen - LRA				
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan - LRA				
5 . 2 . 1 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian - LRA				
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami - LRA				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan - LRA				
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang - LRA				
5 . 2 . 1 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan - LRA				
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan - LRA				
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran - LRA				
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan - LRA				
5 . 2 . 1 . 04 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lainnya				

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan - LRA		
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat - LRA		
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar - LRA		
5 . 2 . 1 . 05 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis - LRA		
5 . 2 . 1 . 05 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa - LRA		
5 . 2 . 1 . 05 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus - LRA		
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan - LRA		
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak - LRA		
5 . 2 . 1 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar - LRA		
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa - LRA		
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa - LRA		
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau - LRA		
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak - LRA		
5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus - LRA		
5 . 2 . 1 . 08 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak - LRA		
5 . 2 . 1 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput - LRA		
5 . 2 . 1 . 09 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang - LRA		
5 . 2 . 1 . 09 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput - LRA		
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain - LRA		
5 . 2 . 1 . 10 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian - LRA		
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan - LRA		
5 . 2 . 1 . 11 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst - LRA		
5 . 2 . 1 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan - LRA		
5 . 2 . 1 . 12 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan - LRA		
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang - LRA LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan - LRA		
5 . 2 . 1 . 13 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 1 . 13 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga - LRA	D	
5 . 2 . 1 . 13 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah - LRA		
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat - LRA		
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses - LRA		
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung - LRA		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger - LRA		
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator - LRA		
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger - LRA		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik - LRA		
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung - LRA		
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator - LRA		
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LRA		
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - LRA		
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - LRA		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang - LRA		
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor - LRA		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang - LRA		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang - LRA		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus - LRA		
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor - LRA		
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang - LRA		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang - LRA		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus - LRA		
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara - LRA		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang - LRA		
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus - LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las -LRA		
5 . 2 . 2 . 09 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es - LRA		
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit - LRA		
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur/Pembanding - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu - LRA		
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas - LRA		
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen - LRA		
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan - LRA		
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan - LRA		
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman - LRA		
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen - LRA		
5 . 2 . 2 . 13 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan - LRA		
5 . 2 . 2 . 13 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium - LRA		
5 . 2 . 2 . 13 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan - LRA		
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor - LRA		
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik - LRA		
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah - LRA		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) - LRA		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - LRA		
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LRA		
5 . 2 . 2 . 15 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer - LRA		
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan - LRA		
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat - LRA		
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing - LRA		
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur - LRA		
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 19 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial - LRA		
5 . 2 . 2 . 19 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi - LRA		
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave FPU - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave TVRO - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF - LRA		
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf) - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa - LRA		
5 . 2 . 2 . 21 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan - LRA		
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian - LRA		
5 . 2 . 2 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga - LRA		
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi		
5 . 2 . 2 . 23 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstil - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 23 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya - LRA		
5 . 2 . 2 . 23 . 64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A - LRA		
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP - LRA		
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain - LRA		
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils - LRA		
5 . 2 . 2 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scentific - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator - LRA		
5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Expermental System - LRA		
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan - LRA		
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan - LRA		
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja - LRA		
5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan - LRA		
5 . 2 . 2 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi - LRA		
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing - LRA		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device - LRA		
5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi - LRA		
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat		
	Laboratorium Lingkungan Hidup - LRA		
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah - LRA		
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara - LRA		
5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran - LRA		
5 . 2 . 2 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan - LRA		
5 . 2 . 2 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang - LRA		
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB - LRA		
5 . 2 . 2 . 30 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment - LRA		
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed) - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri - LRA		
5 . 2 . 2 . 31 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain - LRA		
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api - LRA		
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api - LRA	D	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi - LRA		
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum - LRA		
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat - LRA		
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar - LRA		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser - LRA		
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan - LRA		
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan - LRA		
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perliindungan - LRA		
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan - LRA		
5 . 2 . 3 . 01 . 26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - LRA		
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel - LRA		
5 . 2 . 3 . 02 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun - LRA		
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara - LRA		
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai - LRA		
5 . 2 . 3 . 03 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara - LRA		
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi - LRA		
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah - LRA		
5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan - LRA		
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat - LRA		
5 . 2 . 3 . 04 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peninggalan Sejarah - LRA		
5 . 2 . 3 . 04 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah - LRA		
5 . 2 . 3 . 04 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah - LRA		
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan - LRA		
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan - LRA		
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan - LRA		
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya - LRA		
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi - LRA		
5 . 2 . 3 . 06 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu - LRA		
5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha - LRA		
5 . 2 . 3 . 06 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya - LRA		
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya - LRA		
5 . 2 . 3 . 07 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah - LRA		
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti - LRA		
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas - LRA		
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 3 . 09 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat - LRA	D	
5 . 2 . 3 . 09 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar - LRA		
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI) - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells) - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal - LRA		
5 . 2 . 3 . 10 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light - LRA		
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta - LRA		
5 . 2 . 4 . 01 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang - LRA		
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang - LRA		
5 . 2 . 4 . 02 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan - LRA		
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi - LRA		
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 04 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 05 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan BA - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulungan Sungai - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai - LRA		
5 . 2 . 4 . 06 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai - LRA		
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 07 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku - LRA		
5 . 2 . 4 . 08 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 4 . 08 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku - LRA		
5 . 2 . 4 . 08 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih - LRA		
5 . 2 . 4 . 08 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku - LRA		
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku - LRA		
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 09 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 09 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 09 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 09 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut - LRA		
5 . 2 . 4 . 10 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar - LRA		
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih - LRA		
5 . 2 . 4 . 11 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah - LRA		
5 . 2 . 4 . 11 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 11 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam - LRA		
5 . 2 . 4 . 11 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal - LRA		
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya - LRA		
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - LRA		
5 . 2 . 4 . 12 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri - LRA		
5 . 2 . 4 . 12 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian - LRA		
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah - LRA		
5 . 2 . 4 . 13 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik - LRA		
5 . 2 . 4 . 13 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik - LRA		
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - LRA		
5 . 2 . 4 . 14 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - LRA		
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Mikro (Hidro) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 4 . 15 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) - LRA		
5 . 2 . 4 . 15 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm) - LRA		
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik - LRA		
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk - LRA		
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik Distribusi - LRA		
5 . 2 . 4 . 16 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik - LRA		
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan - LRA		
5 . 2 . 4 . 17 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat - LRA		
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas - LRA		
5 . 2 . 4 . 18 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas - LRA		
5 . 2 . 4 . 18 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas - LRA		
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman - LRA		
5 . 2 . 4 . 19 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir - LRA		
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum - LRA		
5 . 2 . 4 . 20 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa - LRA		
5 . 2 . 4 . 20 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi - LRA		
5 . 2 . 4 . 20 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi - LRA		
5 . 2 . 4 . 20 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah - LRA		
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik - LRA		
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi - LRA		
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi - LRA		
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon - LRA		
5 . 2 . 4 . 22 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah - LRA		
5 . 2 . 4 . 22 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah - LRA		
5 . 2 . 4 . 22 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air - LRA		
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas - LRA		
5 . 2 . 4 . 23 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 4 . 23 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas - LRA	D	
5 . 2 . 4 . 23 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM - LRA		
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga - LRA		
5 . 2 . 5 . 01 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah - LRA		
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan - LRA		
5 . 2 . 5 . 02 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala - LRA		
5 . 2 . 5 . 02 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan - LRA		
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material) - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform) - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video - LRA		
5 . 2 . 5 . 03 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt - LRA		
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen - LRA		
5 . 2 . 5 . 04 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
5 . 2 . 5 . 04 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan - LRA		
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya - LRA		
5 . 2 . 5 . 05 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam - LRA		
5 . 2 . 5 . 05 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air - LRA		
5 . 2 . 5 . 05 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara - LRA		
5 . 2 . 5 . 05 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya - LRA		
5 . 2 . 5 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang - LRA		
5 . 2 . 5 . 06 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan - LRA		
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman - LRA		
5 . 2 . 5 . 07 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan - LRA		
5 . 2 . 5 . 07 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hortikultura - LRA		
5 . 2 . 5 . 07 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan - LRA		
5 . 2 . 5 . 07 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias - LRA		
5 . 2 . 5 . 07 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika - LRA		
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi - LRA		
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi - LRA		
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA		
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	D	
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga - LRA		
5 . 3 . 1 . 01 . 01	Belanja Tak Terduga - LRA		
5 . 3 . 1 . 01 . 02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam - LRA		
5 . 3 . 1 . 01 . 03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya - LRA		
6	TRANSFER		
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D	
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D	
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
6 . 1 . 2 . 01 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
6 . 1 . 2 . 01 . 02	Dst.....		
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D	
6 . 2 . 1 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
6 . 2 . 1 . 02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
6 . 2 . 1 . 02 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D	
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 . 2 . 2 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....		
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D	
6 . 2 . 3 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik		
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik		
6 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....		
6 . 2 . 4	Transfer Dana Otonomi Khusus	D	
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota		
6 . 2 . 4 . 01 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota		
6 . 2 . 4 . 01 . 02	Dst.....		
7	PEMBIAYAAN		
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
7 . 1 . 1	Penggunaan SILPA	K	
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya		
7 . 1 . 1 . 01 . 01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya		
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SILPA		
7 . 1 . 1 . 02 . 01	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7 . 1 . 1 . 02 . 02	Lain-lain		
7 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	K	
7 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan		
7 . 1 . 2 . 01 . 01	Pencairan Dana Cadangan		
7 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	K	
7 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
7 . 1 . 3 . 01 . 01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN		
7 . 1 . 3 . 01 . 02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD		
7 . 1 . 3 . 01 . 03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta		
7 . 1 . 4	Pinjaman Dalam Negeri	K	
7 . 1 . 4 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		
7 . 1 . 4 . 01 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		
7 . 1 . 4 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7 . 1 . 4 . 02 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		
7 . 1 . 4 . 03 . 01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 4 . 04 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 4 . 05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya		
7 . 1 . 4 . 05 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya		
7 . 1 . 4 . 06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
7 . 1 . 4 . 06 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
7 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Piutang	K	
7 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara		
7 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara		
7 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah		
7 . 1 . 5 . 02 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah		
7 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 5 . 03 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7 . 1 . 5 . 04 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		
7 . 1 . 5 . 05 . 01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		
7 . 1 . 6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	K	
7 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan		
7 . 1 . 6 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
7.1.6.02	Penarikan Dana Bergulir		
7.1.6.02.01	Penarikan Dana Bergulir		
7.1.6.03	Pencairan Deposito Jangka Panjang		
7.1.6.03.01	Pencairan Deposito Jangka Panjang		
7.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
7.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
7.1.7	Pinjaman Luar Negeri	K	
7.1.7.01	Pinjaman Luar Negeri		
7.1.7.01.01	Pinjaman Luar Negeri		
7.1.8	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	K	
7.1.8.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		
7.1.8.01.01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	D	
7.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan		
7.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan		
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	D	
7.2.2.01	Penyertaan Modal pada BUMN		
7.2.2.01.01	Penyertaan Modal pada BUMN		
7.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD		
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD		
7.2.2.03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
7.2.2.03.01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	D	
7.2.3.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank		
7.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank		
7.2.3.02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7.2.3.02.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7.2.3.03	Pelunasan Obligasi Daerah		
7.2.3.03.01	Pelunasan Obligasi Daerah		
7.2.3.04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
7.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
7.2.3.05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya		
7.2.3.05.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya		
7.2.3.06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
7.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	D	
7.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara		
7.2.4.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara		
7.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah		
7.2.4.02.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah		
7.2.4.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		
7.2.4.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		
7.2.4.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7.2.4.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	D	
7.2.5.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan		
7.2.5.01.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan		
7.2.5.02	Pembentukan Dana Bergulir		
7.2.5.02.01	Pembentukan Dana Bergulir		
7.2.5.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang		
7.2.5.03.01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang		
7.2.5.04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya		
7.2.5.04.01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya		
7.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	D	
7.2.6.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		
7.2.6.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	D	
7.2.7.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		
7.3	SALDO ANGGARAN LEBIH		
7.3.1	Surplus/Defisit LRA	K	
7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA		
7.3.1.01.01	Surplus/Defisit LRA		
7.3.2	Pembiayaan Netto	K	
7.3.2.01	Pembiayaan Netto		
7.3.2.01.01	Pembiayaan Netto		
7.3.3	SILPA/SIKPA	K	
7.3.3.01	SILPA/SIKPA		
7.3.3.01.01	SILPA/SIKPA		
7.3.4	Perubahan SAL	K	
7.3.4.01	Perubahan SAL		
7.3.4.01.01	Perubahan SAL		
8	PENDAPATAN - LO		
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	K	
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO		
8.1.1.06.01	Hotel - LO		
8.1.1.06.02	Motel - LO		
8.1.1.06.03	Cottage - LO		
8.1.1.06.04	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos - LO		
8.1.1.06.05	Wisma Pariwisata - LO		
8.1.1.06.06	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO		
8.1.1.06.07	Gubuk Pariwisata - LO		
8.1.1.06.08	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO		
8.1.1.07	Pajak Restoran - LO		
8.1.1.07.01	Restoran - LO		
8.1.1.07.02	Rumah Makan - LO		
8.1.1.07.03	Kafetaria - LO		
8.1.1.07.04	Kantin - LO		
8.1.1.07.05	Warung - LO		
8.1.1.07.06	Bar - LO		
8.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LO		
8.1.1.07.08	Mie Bakso - LO		
8.1.1.08	Pajak Hiburan - LO		
8.1.1.08.01	Tontonan Film/Bioskop - LO		
8.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO		
8.1.1.08.03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO		
8.1.1.08.04	Pameran - LO		
8.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO		
8.1.1.08.06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO		
8.1.1.08.07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO		
8.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO		
8.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO		
8.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga - LO		
8.1.1.08.11	Kolam Renang/Obyek Wisata - LO		
8.1.1.08.12	Mainan Anak/Video Game/Internet - LO		
8.1.1.08.13	Hiburan Interaktif - LO		
8.1.1.09	Pajak Reklame - LO		
8.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO		
8.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain - LO		
8.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO		
8.1.1.09.04	Pajak Reklame Selebaran - LO		
8.1.1.09.05	Pajak Reklame Berjalan - LO		
8.1.1.09.06	Pajak Reklame Udara - LO		
8.1.1.09.07	Pajak Reklame Apung - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 1 . 09 . 08	Pajak Reklame Suara - LO		
8 . 1 . 1 . 09 . 09	Pajak Reklame Film/Slide - LO		
8 . 1 . 1 . 09 . 10	Pajak Reklame Peragaan - LO		
8 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LO		
8 . 1 . 1 . 10 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN - LO		
8 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LO		
8 . 1 . 1 . 11 . 01	Pajak Parkir - LO		
8 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LO		
8 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Air Tanah - LO		
8 . 1 . 1 . 13	Pajak Sarang Burung Walet - LO		
8 . 1 . 1 . 13 . 01	Pajak Sarang Burung Walet - LO		
8 . 1 . 1 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 01	Asbes - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 02	Batu Tulis - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 03	Batu setengah permata - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 04	Batu Kapur - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 05	Batu Apung - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 06	Batu Permata - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 07	Bentonit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 08	Dolomit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 09	Feldspar - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 10	Garam Batu (Halite) - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 11	Grafit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 12	Granit/Andesit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 13	Gips - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 14	Kalsit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 15	Kaolin - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 16	Leusit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 17	Magnesit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 18	Mika - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 19	Marmer - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 20	Nitrat - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 21	Opsidien - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 22	Oker - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 23	Pasir dan kerikil - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 24	Pasir Kuarsa - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 25	Perlit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 26	Phospat - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 27	Talk - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 29	Tanah Diatome - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 30	Tanah Liat - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 31	Tawas (Alum) - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 32	Tras - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 33	Yarosif - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 34	Zeolit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 35	Basal - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 36	Trakit - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 38	Batu Gunung/Kali - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 39	Sirtu - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 40	Pasir - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 41	Tanah Timbun - LO		
8 . 1 . 1 . 14 . 42	Batu Pecah/Kerikil - LO		
8 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO		
8 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) - LO		
8 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO		
8 . 1 . 1 . 16 . 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO		
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	K	
8 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO		
8 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 2 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO		
8 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO		
8 . 1 . 2 . 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO		
8 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO		
8 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO		
8 . 1 . 2 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO		
8 . 1 . 2 . 04 . 01	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO		
8 . 1 . 2 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO		
8 . 1 . 2 . 05 . 01	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO		
8 . 1 . 2 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO		
8 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - LO		
8 . 1 . 2 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO		
8 . 1 . 2 . 07 . 01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO		
8 . 1 . 2 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO		
8 . 1 . 2 . 08 . 01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO		
8 . 1 . 2 . 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO		
8 . 1 . 2 . 09 . 01	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO		
8 . 1 . 2 . 10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO		
8 . 1 . 2 . 10 . 01	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO		
8 . 1 . 2 . 11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO		
8 . 1 . 2 . 11 . 01	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair - LO		
8 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO		
8 . 1 . 2 . 12 . 01	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO		
8 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO		
8 . 1 . 2 . 13 . 01	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO		
8 . 1 . 2 . 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
8 . 1 . 2 . 14 . 01	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
8 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 15 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO		
8 . 1 . 2 . 16 . 01	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan - LO		
8 . 1 . 2 . 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO		
8 . 1 . 2 . 17 . 01	Retribusi Tempat Pelelangan - LO		
8 . 1 . 2 . 18	Retribusi Terminal - LO		
8 . 1 . 2 . 18 . 01	Retribusi Terminal - LO		
8 . 1 . 2 . 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO		
8 . 1 . 2 . 19 . 01	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO		
8 . 1 . 2 . 20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO		
8 . 1 . 2 . 20 . 01	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO		
8 . 1 . 2 . 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO		
8 . 1 . 2 . 21 . 01	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO		
8 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO		
8 . 1 . 2 . 22 . 01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO		
8 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO		
8 . 1 . 2 . 23 . 01	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO		
8 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyebrangan Air - LO		
8 . 1 . 2 . 24 . 01	Retribusi Penyeberangan di Air - LO		
8 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 25 . 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO		
8 . 1 . 2 . 26 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO		
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO		
8 . 1 . 2 . 27 . 01	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO		
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO		
8 . 1 . 2 . 28 . 01	Retribusi Izin Gangguan - LO		
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO		
8 . 1 . 2 . 29 . 01	Retribusi Izin Trayek - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO		
8 . 1 . 2 . 30 . 01	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO		
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO		
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO		
8 . 1 . 2 . 33	Retribusi Bongkar Muat - LO		
8 . 1 . 2 . 33 . 01	Retribusi Bongkar Muat - LO		
8 . 1 . 2 . 34	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LO		
8 . 1 . 2 . 34 . 01	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LO		
8 . 1 . 2 . 35	Retribusi Leges - LO		
8 . 1 . 2 . 35 . 01	Retribusi Leges - LO		
8 . 1 . 2 . 36	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LO		
8 . 1 . 2 . 36 . 01	Retribusi Izin Usaha Angkutan - LO		
8 . 1 . 2 . 37	Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan - LO		
8 . 1 . 2 . 37 . 01	Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan - LO		
8 . 1 . 2 . 38	Retribusi Izin Usaha Perdagangan - LO		
8 . 1 . 2 . 38 . 01	Retribusi Izin Usaha Perdagangan - LO		
8 . 1 . 2 . 39	Retribusi Izin Usaha Industri - LO		
8 . 1 . 2 . 39 . 01	Retribusi Izin Usaha Industri - LO		
8 . 1 . 2 . 40	Retribusi Izin Pertambangan Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 40 . 01	Retribusi Izin Pertambangan Daerah - LO		
8 . 1 . 2 . 41	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LO		
8 . 1 . 2 . 41 . 01	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan - LO		
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	K	
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO		
8 . 1 . 3 . 01 . 01	BPRS Al-Madina - LO		
8 . 1 . 3 . 01 . 02	BUMD Bank Jabar Banten Cabang Tasikmalaya - LO		
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO		
8 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO		
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO		
8 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO		
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	K	
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		
8 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Pelepasan Hak Atas Tanah Tanah - LO		
8 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO		
8 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO		
8 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO		
8 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 02 . 01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO		
8 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO		
8 . 1 . 4 . 03 . 03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO		
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO		
8 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito - LO		
8 . 1 . 4 . 04 . 02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO		
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 05 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO		
8 . 1 . 4 . 05 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO		
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO		
8 . 1 . 4 . 06 . 01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 06 . 02	Penerimaan Potongan dari - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 4 . 06 . 03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO		
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO		
8 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO		
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO		
8 . 1 . 4 . 08 . 16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO		
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO		
8 . 1 . 4 . 09 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO		
8 . 1 . 4 . 09 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO		
8 . 1 . 4 . 09 . 03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO		
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO		
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		
8 . 1 . 4 . 12 . 01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO		
8 . 1 . 4 . 12 . 02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO		
8 . 1 . 4 . 12 . 03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LO		
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 4 . 13 . 05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Hasil Temuan Pemeriksa - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 07	Pendapatan dari Pengembalian Pinjaman Modal - LO		
8 . 1 . 4 . 13 . 08	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO		
8 . 1 . 4 . 14 . 01	Pendapatan Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO		
8 . 1 . 4 . 14 . 02	Pendapatan Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO		
8 . 1 . 4 . 14 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO		
8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO		
8 . 1 . 4 . 15 . 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO		
8 . 1 . 4 . 15 . 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO		
8 . 1 . 4 . 15 . 03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah		
8 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 16 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO		
8 . 1 . 4 . 16 . 02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama		
	Pemanfaatan- LO		
8 . 1 . 4 . 16 . 03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah – LO		
8 . 1 . 4 . 16 . 04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO		
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LO		
8 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 18 . 02	Pendapatan Hibah BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 18 . 03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 18 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 19 . 01	Denda Adm. Keterlambatan Pendaftaran Akta-akta selain Akta Kelahiran - LO		
8 . 1 . 4 . 19 . 02	Pendapatan Sewa Kekayaan Daerah (Kolam, Sawah, Tanah Darat) - LO		
8 . 1 . 4 . 19 . 03	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO		
8 . 1 . 4 . 20 . 01	Fasilitas Sosial - LO		
8 . 1 . 4 . 20 . 02	Fasilitas Umum - LO		
8 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO		
8 . 1 . 4 . 21 . 01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO		
8 . 1 . 4 . 21 . 02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO		
8 . 1 . 4 . 21 . 03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO		
8 . 1 . 4 . 22	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir - LO		
8 . 1 . 4 . 22 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO		
8 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		
8 . 1 . 4 . 23 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		
8 . 1 . 4 . 24	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKTP - LO		
8 . 1 . 4 . 24 . 01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN FKTP - LO		
8 . 1 . 4 . 25	Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 01	Ijin Jalan Masuk dan Penggunaan Trotoar -		
8 . 1 . 4 . 25 . 02	Penutupan Selokan - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 03	Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi/Advice Planing - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 04	Dana Bergulir Koperasi - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 05	DAKABALAREA - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 06	PINBUK - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 07	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) -		
8 . 1 . 4 . 25 . 08	Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 09	Tanda Daftar Gudang (TDG) -		
8 . 1 . 4 . 25 . 10	Tera Ulang - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 11	Kolam Renang - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 12	PT. Bina Kayu Lestari - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 13	PT. Dahana – LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 14	Biaya Nikah - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 15	Pengusaha MCK - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 16	Tasik Fair - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 1 . 4 . 25 . 17	Pendapatan Bidang Pertanian - LO	K	
8 . 1 . 4 . 25 . 18	Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 19	Pasar Modern - LO		
8 . 1 . 4 . 25 . 20	Tempat Rekreasi Urug - LO		
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO		
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO		
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pemerataan Pajak - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO		
8 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO		
8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO		
8 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO		
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		
8 . 2 . 1 . 03 . 01	Dana Alokasi Umum - LO		
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 01	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 02	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 03	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 04	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 06	DAK Bidang Kehutanan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 08	DAK Bidang Kesehatan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 12	DAK Bidang Perdagangan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 15	DAK Bidang Pertanian - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 18	DAK Bidang Pendidikan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 20	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdesaan - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 21	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 22	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 23	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 24	DAK Non Fisik - Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 25	DAK Non Fisik - Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi - LO		
8 . 2 . 1 . 04 . 26	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB		
8 . 2 . 1 . 04 . 27	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN	
		NORMAL		
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	K		
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO			
8 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO			
8 . 2 . 2 . 01 . 02	Dana Tambahan Infrastruktur - LO			
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO			
8 . 2 . 2 . 02 . 01	Dana Keistimewaan - LO			
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 05	Bantuan Operasional Sekolah - LO			
8 . 2 . 2 . 03 . 06	Dana Penyesuaian Tunjangan Tenaga Kependidikan - LO			
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			K
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO			
8 . 2 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO			
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO			
8 . 2 . 3 . 02 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO			
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO			
8 . 2 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO			
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO			K
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO			
8 . 2 . 4 . 01 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO			
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO			
8 . 2 . 4 . 02 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO			
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO			
8 . 2 . 4 . 03 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO			
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO			
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO			
8 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO			
8 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
8 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
8 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO			
8 . 3 . 1 . 03 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO			
8 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO			
8 . 3 . 1 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan - LO			
8 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO			
8 . 3 . 1 . 05 . 01	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO			
8 . 3 . 1 . 05 . 02	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO			
8 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO			
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO			
8 . 3 . 2 . 01	Dana Darurat - LO			
8 . 3 . 2 . 01 . 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO			
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO			
8 . 3 . 3 . 01	Pendapatan Lainnya - LO			
8 . 3 . 3 . 01 . 01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO			
8 . 4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO			
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			
8 . 4 . 1 . 01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO			
8 . 4 . 1 . 01 . 06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO			

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	K	
8 . 4 . 2 . 01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO		
8 . 4 . 2 . 01 . 07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO		
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	K	
8 . 4 . 3 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
8 . 4 . 3 . 01 . 01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
8 . 4 . 3 . 01 . 02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	K	
8 . 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO		
8 . 5 . 1 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO		
8 . 5 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	D	
9	BEBAN		
9 . 1	BEBAN OPERASI		
9 . 1 . 1	Beban Pegawai		
9 . 1 . 1 . 01	Beban Gaji dan Tunjangan		
9 . 1 . 1 . 01 . 01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi		
9 . 1 . 1 . 01 . 02	Beban Tunjangan Keluarga		
9 . 1 . 1 . 01 . 03	Beban Tunjangan Jabatan		
9 . 1 . 1 . 01 . 04	Beban Tunjangan Fungsional		
9 . 1 . 1 . 01 . 05	Beban Tunjangan Fungsional Umum		
9 . 1 . 1 . 01 . 06	Beban Tunjangan Beras		
9 . 1 . 1 . 01 . 07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		
9 . 1 . 1 . 01 . 08	Beban Pembulatan Gaji		
9 . 1 . 1 . 01 . 09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan		
9 . 1 . 1 . 01 . 10	Beban Uang Paket		
9 . 1 . 1 . 01 . 11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah		
9 . 1 . 1 . 01 . 12	Beban Tunjangan Komisi		
9 . 1 . 1 . 01 . 13	Beban Tunjangan Badan Anggaran		
9 . 1 . 1 . 01 . 14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan		
9 . 1 . 1 . 01 . 15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya		
9 . 1 . 1 . 01 . 16	Beban Tunjangan Perumahan		
9 . 1 . 1 . 01 . 17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas		
9 . 1 . 1 . 01 . 18	Beban Uang Jasa Pengabdian		
9 . 1 . 1 . 01 . 19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
9 . 1 . 1 . 01 . 20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD		
9 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan		
9 . 1 . 1 . 02	Beban Tambahan Penghasilan PNS		
9 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		
9 . 1 . 1 . 02 . 02	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas		
9 . 1 . 1 . 02 . 03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja		
9 . 1 . 1 . 02 . 04	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
9 . 1 . 1 . 02 . 05	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja		
9 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya		
9 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD		
9 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Dana Tambahan		
9 . 1 . 1 . 03	Penghasilan Guru PNSD dan/CPNSD		
9 . 1 . 1 . 03 . 01	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		
9 . 1 . 1 . 03 . 02	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		
9 . 1 . 1 . 03 . 03	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH		
9 . 1 . 1 . 04	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		
9 . 1 . 1 . 04 . 01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 1 . 04 . 02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan		
9 . 1 . 1 . 04 . 03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan		
9 . 1 . 1 . 04 . 04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan		
9 . 1 . 1 . 04 . 05	Beban Pemungutan PBB		
9 . 1 . 1 . 05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
9 . 1 . 1 . 05 . 06	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel		
9 . 1 . 1 . 05 . 07	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran		
9 . 1 . 1 . 05 . 08	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan		
9 . 1 . 1 . 05 . 09	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame		
9 . 1 . 1 . 05 . 10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan		
9 . 1 . 1 . 05 . 11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir		
9 . 1 . 1 . 05 . 12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah		
9 . 1 . 1 . 05 . 13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet		
9 . 1 . 1 . 05 . 14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
9 . 1 . 1 . 05 . 15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
9 . 1 . 1 . 05 . 16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
9 . 1 . 1 . 05 . 17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
9 . 1 . 1 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
9 . 1 . 1 . 06 . 01	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kesehatan		
9 . 1 . 1 . 06 . 02	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		
9 . 1 . 1 . 06 . 03	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		
9 . 1 . 1 . 06 . 04	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
9 . 1 . 1 . 06 . 05	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
9 . 1 . 1 . 06 . 06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar		
9 . 1 . 1 . 06 . 07	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 1 . 06 . 08	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
9 . 1 . 1 . 06 . 09	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta		
9 . 1 . 1 . 06 . 10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
9 . 1 . 1 . 06 . 11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair		
9 . 1 . 1 . 06 . 12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang		
9 . 1 . 1 . 06 . 13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Pendidikan		
9 . 1 . 1 . 06 . 14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi		
9 . 1 . 1 . 06 . 15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah		
9 . 1 . 1 . 06 . 16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan		
9 . 1 . 1 . 06 . 17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Tempat Pelelangan		
9 . 1 . 1 . 06 . 18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal		
9 . 1 . 1 . 06 . 19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir		
9 . 1 . 1 . 06 . 20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa		
9 . 1 . 1 . 06 . 21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan		
9 . 1 . 1 . 06 . 22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 1 . 06 . 23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	D	
9 . 1 . 1 . 06 . 24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Penyebrangan Air		
9 . 1 . 1 . 06 . 25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah		
9 . 1 . 1 . 06 . 26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan		
9 . 1 . 1 . 06 . 27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
9 . 1 . 1 . 06 . 28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan		
9 . 1 . 1 . 06 . 29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek		
9 . 1 . 1 . 06 . 30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan		
9 . 1 . 1 . 06 . 31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas		
9 . 1 . 1 . 06 . 32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		
9 . 1 . 1 . 07	Beban Uang Lembur		
9 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS		
9 . 1 . 1 . 07 . 02	Beban Uang Lembur Non PNS		
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa		
9 . 1 . 2 . 01	Beban Bahan Pakai Habis		
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor		
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas		
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas		
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Dekorasi dan Desain		
9 . 1 . 2 . 01 . 10	Beban Dokumentasi		
9 . 1 . 2 . 01 . 11	Beban Cinderamata		
9 . 1 . 2 . 01 . 12	Beban Trophy		
9 . 1 . 2 . 01 . 13	Beban Plakat/Pandel		
9 . 1 . 2 . 01 . 14	Beban Pengisian Freon AC		
9 . 1 . 2 . 01 . 15	Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
9 . 1 . 2 . 01 . 16	Beban Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		
9 . 1 . 2 . 01 . 17	Beban Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		
9 . 1 . 2 . 01 . 18	Beban Peralatan dan Perlengkapan Pertanian		
9 . 1 . 2 . 01 . 19	Beban Peralatan dan Perlengkapan Industri		
9 . 1 . 2 . 01 . 20	Beban Peralatan dan Perlengkapan Meubelair		
9 . 1 . 2 . 01 . 21	Beban Peralatan dan Perlengkapan Medis		
9 . 1 . 2 . 01 . 22	Beban Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik		
9 . 1 . 2 . 01 . 23	Beban Peralatan dan Perlengkapan Olahraga		
9 . 1 . 2 . 01 . 24	Beban Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan		
9 . 1 . 2 . 01 . 25	Beban Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan		
9 . 1 . 2 . 01 . 26	Beban Sarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan		
9 . 1 . 2 . 01 . 27	Beban Prasarana Peningkatan Sanitasi Lingkungan		
9 . 1 . 2 . 01 . 29	Beban Peralatan dan Perlengkapan Ketenagalistrikan		
9 . 1 . 2 . 01 . 30	Beban Peralatan dan Perlengkapan Studio		
9 . 1 . 2 . 01 . 31	Beban Kendaraan Bermotor dan/Tidak Bermotor		
9 . 1 . 2 . 01 . 32	Beban Sarana Penanganan Bencana		
9 . 1 . 2 . 01 . 33	Beban Prasarana Penanganan Bencana		
9 . 1 . 2 . 02	Beban Persediaan Bahan/ Material		
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan		
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak		
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan		
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia		
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Bahan Praktek/Percontohan		
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Bahan Pangan/Pakan		
9 . 1 . 2 . 02 . 08	Beban Bahan Bibit/Benih Perikanan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 2 . 02 . 09	Beban Bahan PBM/KBM		
9 . 1 . 2 . 02 . 10	Beban Material Alat Penunjang		
9 . 1 . 2 . 02 . 11	Beban Bahan Baku Jalan/Jembatan		
9 . 1 . 2 . 02 . 12	Beban Persediaan Makanan Pokok		
9 . 1 . 2 . 03	Beban Jasa Kantor		
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon		
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air		
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik-		
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang		
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah		
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman		
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi		
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan		
9 . 1 . 2 . 03 . 10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum		
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar		
	Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Beban Jasa Service/Perbaikan		
9 . 1 . 2 . 03 . 13	Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi		
9 . 1 . 2 . 03 . 14	Beban Jasa Pencucian		
9 . 1 . 2 . 03 . 15	Beban Jasa Pembuangan Limbah/Sampah		
9 . 1 . 2 . 03 . 16	Beban Jasa Kantor Lainnya		
9 . 1 . 2 . 04	Beban Premi Asuransi		
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan		
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah		
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Beban Premi Asuransi Keselamatan Kerja		
9 . 1 . 2 . 04 . 04	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan		
9 . 1 . 2 . 05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service		
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang		
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR		
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan		
9 . 1 . 2 . 05 . 08	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi		
9 . 1 . 2 . 06	Beban Cetak dan Penggandaan		
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak		
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan		
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Beban Penjilidan		
9 . 1 . 2 . 07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
9 . 1 . 2 . 07 . 01	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas		
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat		
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas		
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Beban Sewa Gudang		
9 . 1 . 2 . 08	Beban Sewa Sarana Mobilitas		
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat		
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air		
9 . 1 . 2 . 08 . 03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara		
9 . 1 . 2 . 09	Beban Sewa Alat Berat		
9 . 1 . 2 . 09 . 01	Beban Sewa Eskavator		
9 . 1 . 2 . 09 . 02	Beban Sewa Bulldoser		
9 . 1 . 2 . 10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi		
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer		
9 . 1 . 2 . 10 . 03	Beban Sewa Proyektor		
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator		
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda		
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional		
9 . 1 . 2 . 10 . 07	Beban Sewa Sound System		
9 . 1 . 2 . 10 . 08	Beban Sewa Peralatan Kesenian		
9 . 1 . 2 . 10 . 09	Beban Sewa Peralatan Praktek/Percontohan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 2 . 10 . 10	Beban Sewa Peralatan Studio dan Kelengkapannya		
9 . 1 . 2 . 10 . 12	Beban Sewa Dekorasi		
9 . 1 . 2 . 10 . 13	Beban Sewa Air Conditioner (AC)		
9 . 1 . 2 . 10 . 14	Beban Sewa Pompa Air		
9 . 1 . 2 . 10 . 15	Beban Sewa Panggung		
9 . 1 . 2 . 10 . 16	Beban Sewa Televisi		
9 . 1 . 2 . 10 . 17	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan		
9 . 1 . 2 . 11	Beban Makanan dan Minuman		
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai		
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat		
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu		
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan		
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan		
9 . 1 . 2 . 12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH		
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)		
9 . 1 . 2 . 12 . 03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)		
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)		
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Beban Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		
9 . 1 . 2 . 12 . 07	Beban Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDHLP)		
9 . 1 . 2 . 12 . 08	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)		
9 . 1 . 2 . 12 . 09	Beban Pakaian Linmas/Hansip		
9 . 1 . 2 . 12 . 10	Beban Kelengkapan Pakaian Dinas		
9 . 1 . 2 . 13	Beban Pakaian Kerja		
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan		
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Dst ...		
9 . 1 . 2 . 14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI		
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah		
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional		
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga		
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Beban Kelengkapan Pakaian Dinas		
9 . 1 . 2 . 14 . 06	Beban Pakaian Khusus Peresmian		
9 . 1 . 2 . 14 . 07	Beban Pakaian Khusus Ibadah		
9 . 1 . 2 . 14 . 08	Beban Pakaian Khusus Peserta		
9 . 1 . 2 . 15	Beban Perjalanan Dinas		
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		
9 . 1 . 2 . 16	Beban Perjalanan Pindah Tugas		
9 . 1 . 2 . 16 . 01	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah		
9 . 1 . 2 . 16 . 02	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah		
9 . 1 . 2 . 17	Beban Pemulangan Pegawai		
9 . 1 . 2 . 17 . 01	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah		
9 . 1 . 2 . 17 . 02	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah		
9 . 1 . 2 . 17 . 03	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas		
9 . 1 . 2 . 18	Beban Pemeliharaan		
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharaan Tanah		
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
9 . 1 . 2 . 18 . 04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
9 . 1 . 2 . 19	Beban Jasa Konsultasi		
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian		
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan		
9 . 1 . 2 . 19 . 04	Beban Jasa Konsultansi Advokat/Pengacara		
9 . 1 . 2 . 19 . 05	Beban Jasa Konsultansi Rekrutmen SDM		
9 . 1 . 2 . 19 . 06	Beban Jasa Konsultansi Keamanan		
9 . 1 . 2 . 19 . 07	Beban Jasa Konsultansi Event Organizer (EO)		
9 . 1 . 2 . 19 . 08	Beban Jasa Konsultansi Telekomunikasi dan Informasi		
9 . 1 . 2 . 20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		
9 . 1 . 2 . 21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
9 . 1 . 2 . 21 . 01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat		
9 . 1 . 2 . 21 . 02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga		
9 . 1 . 2 . 22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		
9 . 1 . 2 . 22 . 01	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3		
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1		
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2		
9 . 1 . 2 . 22 . 04	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3		
9 . 1 . 2 . 22 . 05	Dst		
9 . 1 . 2 . 23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan		
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi		
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis		
9 . 1 . 2 . 24	Beban Honorarium Non Pegawai		
9 . 1 . 2 . 24 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Moderator		
9 . 1 . 2 . 24 . 03	Dst.....		
9 . 1 . 2 . 25	Beban Honorarium PNS		
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		
9 . 1 . 2 . 25 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium PNS Lainnya		
9 . 1 . 2 . 25 . 05	Beban Honorarium Pelayanan Kesehatan		
9 . 1 . 2 . 26	Beban Honorarium Non PNS		
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap		
9 . 1 . 2 . 26 . 04	Beban Honorarium Pejabat Negara		
9 . 1 . 2 . 26 . 05	Beban Honorarium Pegawai Negeri Bukan Sipil		
9 . 1 . 2 . 26 . 06	Beban Honorarium Tokoh Masyarakat		
9 . 1 . 2 . 26 . 07	Beban Honorarium Pelayanan Kesehatan		
9 . 1 . 2 . 26 . 08	Beban Moderator		
9 . 1 . 2 . 27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga		
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat		
9 . 1 . 2 . 28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS		
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS		
9 . 1 . 2 . 29	Beban Barang Dana BOS		
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		
9 . 1 . 2 . 30	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Non PNS		
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		
9 . 1 . 2 . 30 . 02	Beban Sosialisasi		
9 . 1 . 2 . 30 . 03	Beban Bimbingan Teknis		
9 . 1 . 2 . 31	Beban Jasa Ahli PNS		
9 . 1 . 2 . 31 . 01	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS		
9 . 1 . 2 . 32	Beban Jasa Ahli Non PNS		
9 . 1 . 2 . 32 . 01	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS		
9 . 1 . 2 . 33	Beban Jasa Pembongkaran		
9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Jasa Pembongkaran Bangunan Gedung		
9 . 1 . 3	Beban Bunga		
9 . 1 . 3 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman		
9 . 1 . 3 . 01 . 01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah		
9 . 1 . 3 . 01 . 02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
9 . 1 . 3 . 01 . 03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank		
9 . 1 . 3 . 01 . 04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
9 . 1 . 3 . 01 . 05	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya		
9 . 1 . 3 . 01 . 06	Dst		
9 . 1 . 3 . 02	Beban Bunga Utang Obligasi		
9 . 1 . 3 . 02 . 01	Beban Bunga Utang Obligasi		
9 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	D	
9 . 1 . 4 . 01	Beban Subsidi		
9 . 1 . 4 . 01 . 01	Beban Subsidi kepada BUMN		
9 . 1 . 4 . 01 . 02	Beban Subsidi kepada BUMD		
9 . 1 . 4 . 01 . 03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya		
9 . 1 . 4 . 01 . 04	Dst	D	
9 . 1 . 5	Beban Hibah		
9 . 1 . 5 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah		
9 . 1 . 5 . 01 . 01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah		
9 . 1 . 5 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
9 . 1 . 5 . 02 . 01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi		
9 . 1 . 5 . 02 . 02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten		
9 . 1 . 5 . 02 . 03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota		
9 . 1 . 5 . 03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
9 . 1 . 5 . 03 . 01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
9 . 1 . 5 . 03 . 02	Dst.....		
9 . 1 . 5 . 04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
9 . 1 . 5 . 04 . 01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
9 . 1 . 5 . 05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
9 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
9 . 1 . 5 . 05 . 02	Dst ...		
9 . 1 . 5 . 06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar		
9 . 1 . 5 . 06 . 01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota....		
9 . 1 . 5 . 06 . 05	Dst ...		
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	D	
9 . 1 . 6 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
9 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...		
9 . 1 . 6 . 01 . 02	Dst		
9 . 1 . 6 . 02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat		
9 . 1 . 6 . 02 . 01	Beban Bantuan Sosial kepada	D	
9 . 1 . 6 . 02 . 02	Dst		
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
9 . 1 . 7 . 01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
9 . 1 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat		
9 . 1 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung		
9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu		
9 . 1 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor		
9 . 1 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
9 . 1 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor		
9 . 1 . 7 . 01 . 07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
9 . 1 . 7 . 01 . 08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara		
9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin		
9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin		
9 . 1 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur		
9 . 1 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan		
9 . 1 . 7 . 01 . 13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor		
9 . 1 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga		
9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer		
9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio		
9 . 1 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi		
9 . 1 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar		
9 . 1 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran		
9 . 1 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan		
9 . 1 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium		
9 . 1 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
9 . 1 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
9 . 1 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
9 . 1 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api		
9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api		
9 . 1 . 7 . 01 . 33	Beban Penyusutan Amunisi		
9 . 1 . 7 . 01 . 34	Beban Penyusutan Senjata Sinar		
9 . 1 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan		
9 . 1 . 7 . 02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
9 . 1 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
9 . 1 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
9 . 1 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara		
9 . 1 . 7 . 02 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah		
9 . 1 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan		
9 . 1 . 7 . 02 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Candi		
9 . 1 . 7 . 02 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
9 . 1 . 7 . 02 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
9 . 1 . 7 . 02 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu		
9 . 1 . 7 . 02 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
9 . 1 . 7 . 03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		
9 . 1 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan		
9 . 1 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan		
9 . 1 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi		
9 . 1 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut		
9 . 1 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa		
9 . 1 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
9 . 1 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Aira Tanah		
9 . 1 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku		
9 . 1 . 7 . 03 . 09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor		
9 . 1 . 7 . 03 . 10	Beban Penyusutan Bangunan Air		
9 . 1 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
9 . 1 . 7 . 03 . 12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor		
9 . 1 . 7 . 03 . 13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah		
9 . 1 . 7 . 03 . 14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
9 . 1 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik		
9 . 1 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik		
9 . 1 . 7 . 03 . 17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan		
9 . 1 . 7 . 03 . 18	Beban Penyusutan Instalasi Gas		
9 . 1 . 7 . 03 . 19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman		
9 . 1 . 7 . 03 . 20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum		
9 . 1 . 7 . 03 . 21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik		
9 . 1 . 7 . 03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon		
9 . 1 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas		
9 . 1 . 7 . 04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
9 . 1 . 7 . 04 . 01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi		
9 . 1 . 7 . 04 . 02	Dstàààààààà..		
9 . 1 . 7 . 05	Beban Penyusutan Aset Lainnya		
9 . 1 . 7 . 05 . 01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat		
9 . 1 . 7 . 05 . 02	Dstàààààààà..		
9 . 1 . 7 . 06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
9 . 1 . 7 . 06 . 01	Beban Amortisasi Goodwill		
9 . 1 . 7 . 06 . 02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise		
9 . 1 . 7 . 06 . 03	Beban Amortisasi Hak Cipta		
9 . 1 . 7 . 06 . 04	Beban Amortisasi Paten		
9 . 1 . 7 . 06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	D	
9 . 1 . 8 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
9 . 1 . 8 . 01 . 01	Beban Penyisihan Piutang Pajak		
9 . 1 . 8 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 1 . 8 . 01 . 03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
9 . 1 . 8 . 01 . 04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
9 . 1 . 8 . 01 . 05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
9 . 1 . 8 . 01 . 06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
9 . 1 . 8 . 01 . 07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya		
9 . 1 . 8 . 01 . 08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan		
9 . 1 . 8 . 01 . 09	Beban Penyisihan Piutang Hibah		
9 . 1 . 8 . 01 . 10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
9 . 1 . 8 . 01 . 11	Dst.....		
9 . 1 . 8 . 02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
9 . 1 . 8 . 02 . 01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
9 . 1 . 8 . 02 . 02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
9 . 1 . 8 . 02 . 03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
9 . 1 . 8 . 02 . 04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		
9 . 1 . 8 . 02 . 05	Beban Penyisihan Uang Muka		
9 . 1 . 8 . 02 . 06	Dst.....		
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	D	
9 . 1 . 9 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi		
9 . 1 . 9 . 01 . 01	Beban Penurunan Nilai Investasi		
9 . 1 . 9 . 02	Beban Penyisihan Dana Bergulir		
9 . 1 . 9 . 02 . 01	Beban Penyisihan Dana Bergulir		
9 . 1 . 9 . 03	Beban Lain-lain		
9 . 1 . 9 . 03 . 01	Beban Lain-lain		
9 . 2	BEBAN TRANSFER		
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	D	
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 1 . 01 . 02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi		
9 . 2 . 1 . 01 . 03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	D	
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
9 . 2 . 2 . 01 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
9 . 2 . 2 . 01 . 02	Dst.....		
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	D	
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
9 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
9 . 2 . 3 . 01 . 02	Dst.....		
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 3 . 02 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 3 . 02 . 02	Dst.....		
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	D	
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
9 . 2 . 4 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	D	
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik		
9 . 2 . 5 . 01 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik		
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	D	
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....		
9 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....		
9 . 3	DEFISIT NON OPERASIONAL		
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	D	
9 . 3 . 1 . 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO	PERATURAN
		NORMAL	
9 . 3 . 1 . 01 . 01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	D	
9 . 3 . 1 . 01 . 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO		
9 . 3 . 1 . 01 . 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO		
9 . 3 . 1 . 01 . 04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO		
9 . 3 . 1 . 01 . 05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		
9 . 3 . 1 . 01 . 06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO		
9 . 3 . 1 . 01 . 07	Dst		
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
9 . 3 . 2 . 01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO		
9 . 3 . 2 . 01 . 08	Dst	D	
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
9 . 3 . 3 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
9 . 3 . 3 . 01 . 01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya		
9 . 3 . 3 . 01 . 02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO		
9 . 3 . 3 . 01 . 03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	D	
9 . 3 . 3 . 01 . 04	Dst		
9 . 4	BEBAN LUAR BIASA		
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa		
9 . 4 . 1 . 01	Beban Luar Biasa		
9 . 4 . 1 . 01 . 01	Beban Tak Terduga		
9 . 4 . 1 . 01 . 02	Beban Bencana Alam		
9 . 4 . 1 . 01 . 03	Beban Luar Biasa Lainnya		